



**RENCANA KERJA (RENJA)
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BANJAR
TAHUN 2024**



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan karuniaNya sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa Rencana Kerja ini merupakan salah satu dokumen perencanaan yang menggambarkan inventarisasi dari keseluruhan program dan kegiatan pada 10 (sepuluh) Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar selama satu tahun anggaran, serta sebagai pedoman rencana operasional oleh bagian-bagian di Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan untuk semua kebijakan.

Kami menyadari Rencana Kerja ini mungkin masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati demi kesempurnaan penyajian Rencana Kerja yang akan datang kami mengharap adanya masukan dari semua pihak. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi – tingginya kepada semua pihak yang telah turut serta membantu dalam menyusun Rencana Kerja ini sehingga dapat selesai sebagaimana mestinya.

Martapura, 31 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH



Dr. Ir. H. Mokhamad Hilman, ST, MT
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19700328 199503 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1. Latar Belakang	1
I.1.1. Pengertian Ringkas Renja Sekretariat Daerah.....	1
I.1.2. Proses Penyusunan Renja Sekretariat Daerah	2
I.1.3. Keterkaitan Antara Renja Sekretariat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	3
I.2. Landasan Hukum	4
I.2.1. Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Kewenangan Sekretariat Daerah.....	4
I.2.2. Ketentuan Tentang Perencanaan dan Penganggaran	14
I.3. Maksud dan Tujuan.....	17
I.3.1. Maksud Penyusunan Renja Sekretariat Daerah	17
I.3.2. Tujuan Penyusunan Renja Sekretariat Daerah	17
I.4. Sistematika Penulisan	17
BAB II HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN LALU.....	19
II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah	5719
II.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah	57
II.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah	59
II.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	60
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	79
III.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	79
III.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD.....	95
III.3. Program dan Kegiatan	97
III.3.1. Rincian Program dan Kegiatan	97
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	101
BAB V PENUTUP	125

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Realisasi Anggaran Tahun 2022	19
Tabel 2.2	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah dan Pencapaian Renstra Sekretariat Daerah s/d Tahun 2023 Kabupaten Banjar	33
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar sebelum adanya revisi indikator kinerja	58
Tabel 2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2024	61
Tabel 3.1	Keselarasan indikator makro antara RKP, RKPD Provinsi Kalimantan Selatan dan RKPD Kabupaten Banjar	79
Tabel 4.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2024 Dan Perkiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Banjar	102

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Proses Penyusunan Renja SKPD	3
Gambar 1.2 Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	4

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 7 ayat 1 dan 2 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menjelaskan bahwa setiap SKPD berkewajiban menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah. Salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah adalah Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun seperti yang tertuang dipasal 1 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Sekretariat Daerah mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program dan kegiatan pembangunan tahunan pemerintahan daerah.

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan pencapaian kinerja kegiatan pembangunan pada tahun sebelumnya, indikator kinerja output dan outcome yang kurang relevan, serta isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan rencana kerja.

I.1.1. Pengertian Ringkas Renja Sekretariat Daerah

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah adalah dokumen perencanaan Sekretariat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah sebagai dokumen rencana kerja pemerintah lima tahunan.

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD, dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Sekretariat Daerah.

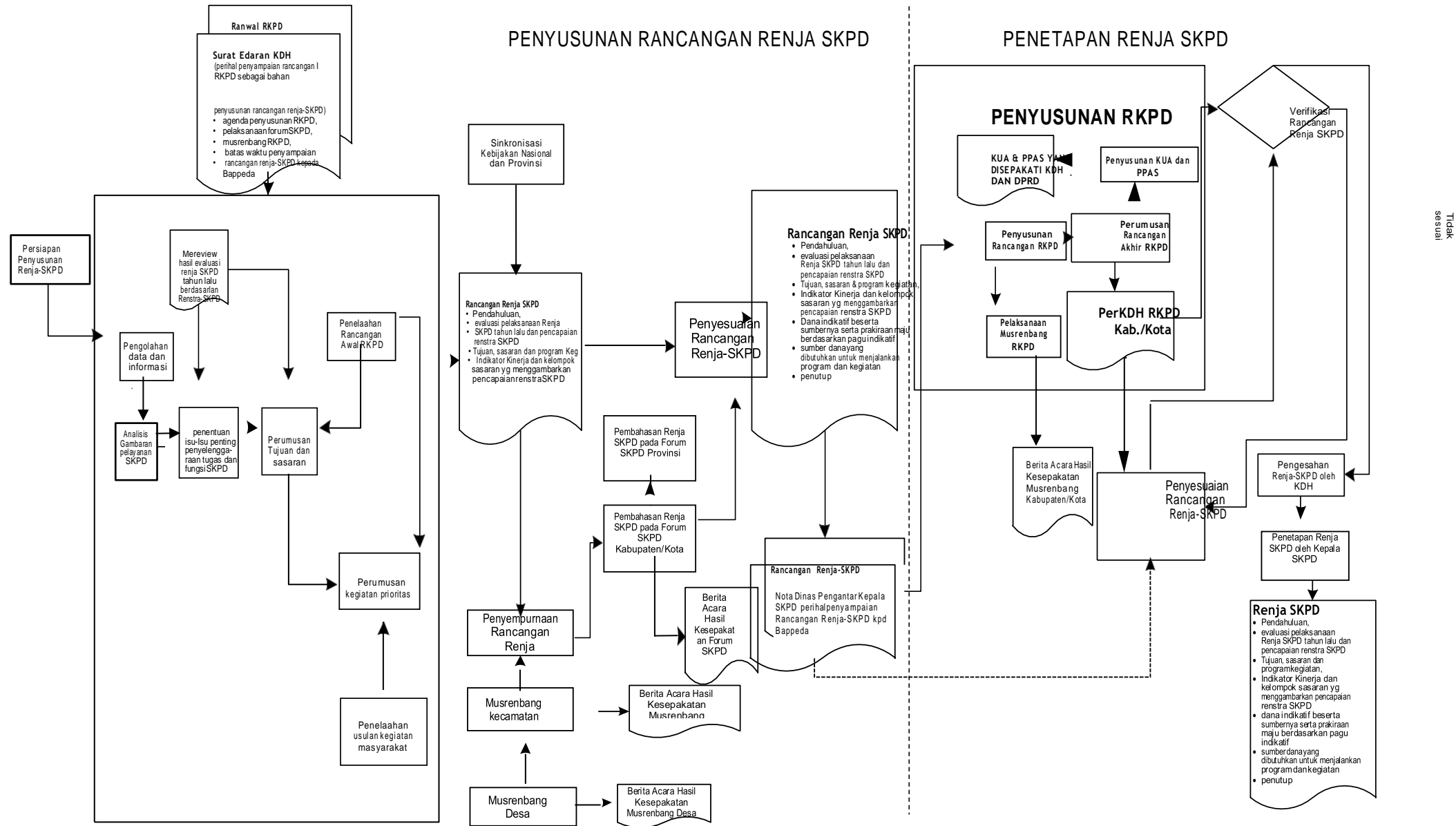
I.1.2. Proses Penyusunan Renja Sekretariat Daerah

Program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang dirumuskan dalam Renstra Sekretariat Daerah dan Renja Sekretariat Daerah disusun berdasarkan :

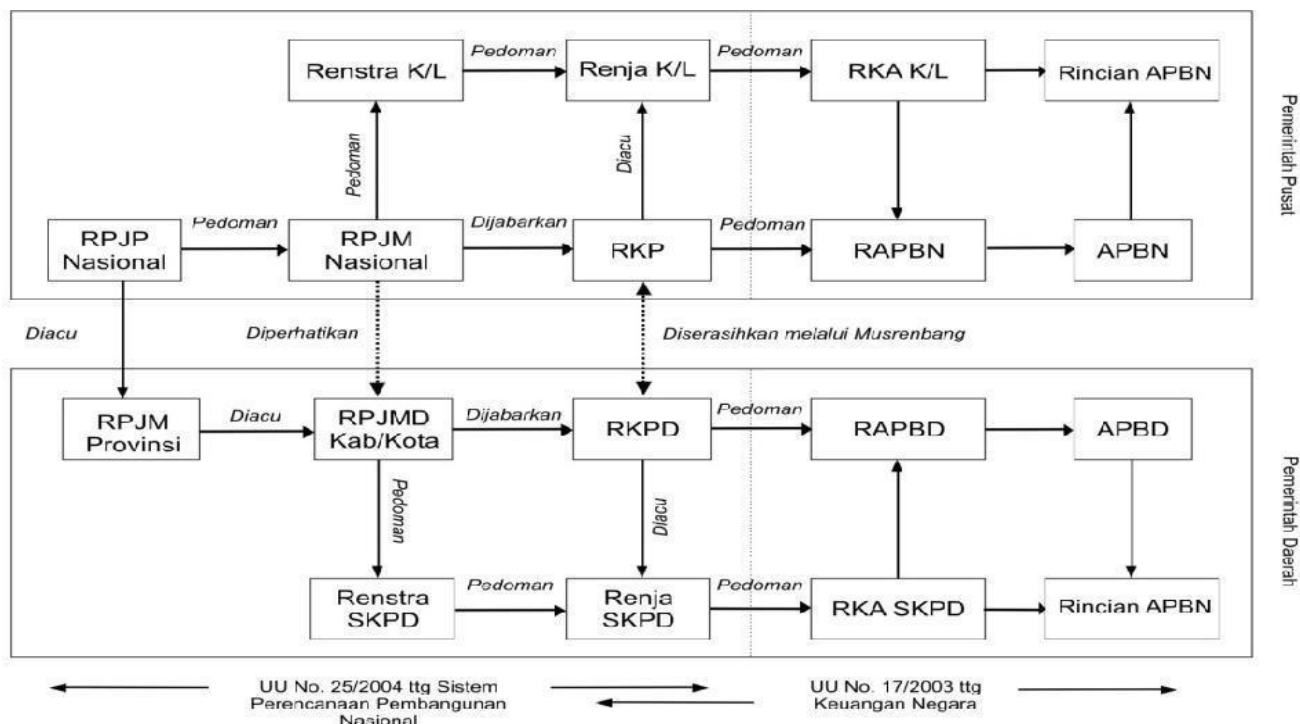
- 1) Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
- 2) Kerangka pendanaan dan pagu indikatif;
- 3) Urusan pemerintahan fungsi penunjang yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

I.1.3. Keterkaitan Antara Renja Sekretariat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Gambar 1.1
Proses Penyusunan Renja SKPD



Gambar 1.2
Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan dan
Penganggaran



I.2. Landasan Hukum

I.2.1. Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Kewenangan Sekretariat Daerah

1. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, adalah sebagai berikut :
 - a. Dalam BAB Ketentuan Umum Pasal 1 angka 14 disebutkan bahwa Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar;
 - b. Dalam BAB Pembentukan Perangkat Daerah Pasal 3 huruf a disebutkan bahwa Sekretariat Daerah Tipe A;
 - c. Penjelasan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah disebutkan bahwa Sekretariat Daerah terdiri dari 3 Asisten dan 10 Bagian.
2. Berdasarkan Peraturan Bupati Banjar Nomor 73 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 49 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah , selanjutnya terinci sebagai berikut:

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :

- i. Sekretariat Daerah.
- ii. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
 1. Bagian Pemerintahan terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Administrasi Pemerintahan;
 - b. Sub Bagian Administrasi Kewilayahan; dan
 - c. Sub Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah.
 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Bina Mental Spiritual;
 - b. Sub Bagian Kesejahteraan Sosial; dan
 - c. Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat.
 3. Bagian Hukum, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perundang-Undangan;
 - b. Sub Bagian Bantuan Hukum; dan
 - c. Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi.
- iii. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi :
 1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
 - b. Sub Bagian Perekonomian; dan
 - c. Sub Bagian Sumber Daya Alam.
 2. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - b. Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan
 - c. Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.
 3. Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - b. Sub Bagian Pengendalian Program.

- iv. Asisten Administrasi Umum, membawahi :
 - 1. Bagian Umum, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perlengkapan; dan
 - c. Sub Bagian Rumah Tangga.
 - 2. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Protokol;
 - b. Sub Bagian Komunikasi Pimpinan; dan
 - c. Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan.
 - 3. Bagian Organisasi, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Kelembagaan Analisa Jabatan;
 - b. Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana; dan
 - c. Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi.
 - 4. Bagian Perencanaan dan Keuangan, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Pelaporan.

(2) Tugas dan Fungsi Sekretaris Daerah adalah sebagai berikut :

- i. Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
- ii. Sekretaris Daerah menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut :
 - 1. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
 - 2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah;
 - 3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
 - 4. Pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara dilingkungan pemerintah daerah; dan
 - 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

(3) Tugas dan Fungsi Asisten adalah sebagai berikut :

- i. Asisten Pemerintahan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan hukum, dan pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat.

- ii. Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam menyusun kebijakan daerah dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan serta pengadaan barang dan jasa.
- iii. Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan serta perencanaan dan keuangan.

(4) Tugas dan Fungsi Bagian – Bagian adalah sebagai berikut :

- i. Bagian Pemerintahan
 - 1. Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Dearah, pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, kerjasama dan otonomi daerah.
 - 2. Menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut :
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, kerjasama dan otonomi daerah;
 - b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan kerjasama dan otonomi daerah.
 - c. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan kerjasama dan otonomi daerah.
 - d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan kerjasama dan otonomi daerah.
 - e. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan

kerjasama dan otonomi daerah.

- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

ii. Bagian Kesejahteraan Rakyat

1. Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang bina mental spritual, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

2. Menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut :

- a. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang bina mental spritual, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah terkait kesejahteraan Sosial;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang bina mental spritual, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
- c. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang bina mental spritual, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

iii. Bagian Hukum

1. Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, serta dokumentasi dan informasi.

2. Menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut :
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
 - b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
 - c. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
 - d. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya. Penyusunan pertimbangan dan bantuan hukum yang timbul dalam pelaksanaan tugas;

iv. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), perekonomian, dan sumber daya alam.
2. Menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut :
 - a. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), perekonomian, dan sumber daya alam;
 - b. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), perekonomian, dan sumber daya alam;

- c. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), perekonomian, dan sumber daya alam; dan
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah terkait ekonomi;
- v. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
- 1. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.
 - 2. Menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut :
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
 - b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
 - c. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
 - d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, serta

pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa; dan

- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

vi. Bagian Administrasi Pembangunan

1. Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyusunan program, evaluasi dan pelaporan serta pengendalian program.
2. Menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut :
 - a. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang penyusunan program, evaluasi dan pelaporan serta pengendalian program;
 - b. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dibidang penyusunan program, evaluasi dan pelaporan serta pengendalian program;
 - c. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang penyusunan program, evaluasi dan pelaporan serta pengendalian program; dan
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

vii. Bagian Umum

1. Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan dan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, serta perlengkapan dan rumah tangga.

2. Menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut :
 - a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, serta perlengkapan dan rumah tangga;
 - b. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, serta perlengkapan dan rumah tangga; dan
 - c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

- viii. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
 1. Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi pimpinan.
 2. Menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut :
 - a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi pimpinan;
 - b. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi pimpinan;
 - c. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi pimpinan; dan
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

- ix. Bagian Organisasi
 1. Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, serta kinerja dan reformasi birokrasi.

2. Menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut :
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
 - b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
 - c. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
 - d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

- x. Bagian Perencanaan dan Keuangan
 1. Mempunyai tugas melaksanakan melaksanakn penyiapan perumusan kebijakan daerah pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan.
 2. Menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut :
 - a. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan;
 - b. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan;
 - c. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan; dan

- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

I.2.2. Ketentuan Tentang Perencanaan dan Penganggaran

Peraturan-peraturan yang digunakan dalam penyusunan rencana kerja terkait dengan perencanaan dan penganggaran, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Nomor 2 Tahun 2022 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri NomorTahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar 2013 Nomor 04 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Banjar Nomor 6).

24. Peraturan Bupati Banjar Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2023.
25. Peraturan Bupati Banjar Nomor 64 Tahun 2022 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2022.
26. Peraturan Bupati Banjar Nomor Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2023 Nomor);

I.3. Maksud dan Tujuan

I.3.1. Maksud Penyusunan Renja Sekretariat Daerah

Maksud penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah adalah :

- 1) Sebagai salah satu landasan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar;
- 2) Menjabarkan rencana strategis Kabupaten Banjar dalam rencana strategis Sekretariat Daerah jangka pendek (1 Tahun);
- 3) Merupakan salah satu instrumen untuk mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan dan merupakan tolak ukur penilaian kinerja bagian -bagian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2024 sebagai wujud dari kinerja Sekretariat Daerah.

I.3.2. Tujuan Penyusunan Renja Sekretariat Daerah

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah adalah :

- 1) Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan di Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar;
- 2) Untuk menetapkan arah kerja serta menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2024;
- 3) Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar.

1.4 Sistematika Penulisan

Renja Sekretariat Daerah 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- 1) Pendahuluan
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Landasan Hukum

- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan
- 2) Hasil Evaluasi Renja Sekretariat Daerah Tahun Lalu
 - 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah
 - 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah
 - 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah
 - 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
 - 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- 3) Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
 - 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
 - 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah
 - 3.3. Program dan Kegiatan
- 4) Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
- 5) Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN LALU

II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah

Penyusunan rencana kerja khususnya program dan kegiatan telah ditetapkan indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*) serta target kinerja capaian program/kegiatan dan realisasi. Pada penyusunan rencana kerja tahun 2024 tidak terlepas dari evaluasi kinerja tahun 2023 (sedang berjalan) dan evaluasi kinerja Tahun 2022, evaluasi ini dijelaskan mengenai pengukuran kinerja yang telah dilaksanakan yang tertuang dalam program dan kegiatan/sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

Adapun Anggaran yang dikelola Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 adalah Sebesar Rp. 46.922.863.652 dengan realisasi sebesar Rp.43.772.074.360 atau (93,29%) tersaji dalam tabel 2.1 di bawah ini.

Tabel 2.1 Realisasi Anggaran Tahun 2022

No	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			
			Target	Realisasi	% Realisasi (capaian)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi (capaian)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Meningkatnya Pengkoordinasian Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pengkoordinasian Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat	100	Persen	100	100	7.586.443.000	6.583.440.284	86,78
		Nilai LPPD	3,1107	Nilai	3,5069	113	600.388.000	582.106.920	96,96
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pengkoordinasian Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat	100	Persen	100	100	7.586.443.000	6.583.440.284	86,78
		Nilai LPPD	3,1107	Nilai	3,5069	113	600.388.000	582.106.920	96,96
Administrasi Pemerintahan	Persentase Fasilitasi, Koordinasi, dan Evaluasi	100	Persen	100	100	600.388.000	582.106.920	96,96	

No	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran				
			Target		Realisasi	% Realisasi (capaian)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi (capaian)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	
		Pelaksanaan Otonomi Daerah								
		Persentase Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	100	Persen	100	100				
		Persentase Terselenggaranya Administrasi Pemerintahan	100	Persen	100	100				
	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	4	Dok	4	100	60.480.500	59.697.000		98,70
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	4	Dok	4	100	370.751.500	356.471.820		96,15
	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	5	Dok	5	100	169.156.000	165.938.100		98,10
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase fasilitasi dan koordinasi di bidang bina mental dan spiritual keagamaan	100	Persen	100	100	7.180.789.000	6.254.145.320		87,10
		Persentase fasilitasi dan koordinasi di bidang kesejahteraan sosial yang sesuai ketentuan	100	Persen	100	100				
		Persentase fasilitasi dan koordinasi di bidang kesejahteraan masyarakat yang sesuai ketentuan	100	Persen	100	100				
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	8	Dok	6	75	4.917.516.000	4.373.636.720		88,94

No	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			
			Target		Realisasi	% Realisasi (capaian)	Target	Realisasi	% Realisasi (capaian)
							(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	4	Dok	4	100	1.853.366.200	1.479.418.000	79,82
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	4	Dok	4	100	409.906.800	401.090.600	97,85
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	100	Persen	100	100	375.095.200	301.161.164	80,29
		Persentase Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum	100	Persen	100	100			
		Persentase Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	100	Persen	100	100			
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	550	Dok	887	161	101.710.400	96.009.900	94,40

No	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja				Anggaran		
			Target		Realisasi	% Realisasi (capaian)	Target	Realisasi	% Realisasi (capaian)
							(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	5	Kasus	5	100	209.271.200	147.654.300	70,56
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	500	Dok	801	160	64.113.600	57.496.964	89,68
	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase Kerjasama Daerah Dengan Pihak Terkait Yang Ditindaklanjuti	100	Persen	100	100	30.558.800	28.133.800	92,06
	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	1	Dok	1	100	30.558.800	28.133.800	92,06
2	Meningkatnya Pengkoordinasian Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum	Persentase Pengkoordinasian Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum	100	%	100	100	40.298.016.152	37.971.210.100	94,23
		Indikator Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	80	Nilai	89,02	111	253.257.000	225.924.360	89,21
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengkoordinasian Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum	100	%	100	100	40.298.016.152	37.971.210.100	94,23
		Indikator Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	80	Nilai	89,02	111	253.257.000	225.924.360	89,21
	Penataan Organisasi	Tingkat efisiensi unit dan prestasi kerja unit Kab. Banjar bernilai Baik	1,3	Skor/Nilai	1,4	108	1.070.344.700	854.821.660	79,86
		Persentase pengelolaan tatalaksana	100	Persen	100	100			
		Persentase PD yang pelayanan publik bernilai Baik	100	Persen	100	100			
		Persentase PD pengelolaan RB bernilai Baik	100	Persen	100	100			
		Persentase PD SAKIP bernilai Baik	100	Persen	100	100			

No	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja				Anggaran		
			Target		Realisasi	% Realisasi (capaian)	Target	Realisasi	% Realisasi (capaian)
							(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
		Persentase Penataan Organisasi	100	Persen	100	100			
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	9	Dok	9	100	248.370.100	187.670.100	75,56
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	6	Laporan	6	100	190.670.400	119.784.500	62,82
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	7	Dok	7	100	631.304.200	547.367.060	86,70
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan penganggaran yang efektif dan efisien	100	Persen	100	100	253.257.000	225.924.360	89,21
		Persentase Bagian yang berkinerja baik	100	Persen	100	100			
		Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang akuntabel	100	Persen	100	100			
		Nilai Sakip Setda	81,5	Nilai	76,42	94			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13	Dok	13	100	137.080.300	127.628.320	93,10
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	Laporan	4	100	81.651.700	71.807.640	87,94
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29	Laporan	28	97	34.525.000	26.488.400	76,72

No	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja				Anggaran		
			Target		Realisasi	% Realisasi (capaian)	Target	Realisasi	% Realisasi (capaian)
							(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan penatausahaan keuangan yang tertib administrasi	100	Persen	100	100	16.653.982.748	15.798.635.674	94,86
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	117	Orang/Bulan	117	100	16.488.723.848	15.644.198.554	94,88
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dok	12	100	165.258.900	154.437.120	93,45
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terlayani	100	Persen	100	100	242.972.000	238.281.298	98,07
		Persentase jumlah kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan	100	Persen	100	100			
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	80	Orang	160	200	17.972.000	17.320.000	96,37
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25	Orang	25	100	225.000.000	220.961.298	98,21
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah terlayani	100	Persen	100	100	5.911.805.708	5.696.173.081	96,35
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6	Paket	6	100	48.942.000	48.731.600	99,57
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17	Paket	17	100	2.971.409.600	2.923.723.475	98,40
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4	Laporan	4	100	21.000.000	11.550.000	55,00

No	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja				Anggaran		
			Target		Realisasi	% Realisasi (capaian)	Target	Realisasi	% Realisasi (capaian)
							(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	Laporan	2	100	2.870.454.108	2.712.168.006	94,49
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang sesuai ketentuan	100	Persen	100	100	3.213.448.000	2.964.474.785	92,25
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	Unit	1	100	701.150.000	666.450.000	95,05
	Pengadaan Kendaraan dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3	Unit	3	100	2.046.202.000	1.840.689.785	89,96
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	14	Paket	14	100	466.096.000	457.335.000	98,12
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang sesuai ketentuan	100	Persen	100	100	3.385.206.640	3.158.232.804	93,30
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	Laporan	2	100	43.040.000	41.682.400	96,85
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	12	100	1.096.866.740	1.071.894.294	97,72
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	Laporan	2	100	220.000.000	196.000.000	89,09
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13	Laporan	13	100	2.025.299.900	1.848.656.110	91,28

No	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja				Anggaran		
			Target		Realisasi	% Realisasi (capaian)	Target	Realisasi	% Realisasi (capaian)
							(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang sesuai ketentuan	100	Persen	100	100	4.698.324.000	4.500.343.118	95,79
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	38	Unit	38	100	1.007.042.000	987.611.420	98,07
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	121	Unit	121	100	1.165.800.000	1.115.011.898	95,64
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16	Unit	16	100	50.000.000	42.450.000	84,90
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	Unit	6	100	1.674.362.000	1.618.762.550	96,68
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	Unit	6	100	435.000.000	429.301.100	98,69
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	250	Unit	250	100	366.120.000	307.206.150	83,91
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase pelaksanaan penatausahaan keuangan yang tertib administrasi	100	Persen	100	100	1.029.049.556	1.016.481.346	98,78
		Persentase Pengadaan Pakaian Dinas KDH/WKDH yang sesuai ketentuan	100	Persen	100	100			

No	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja				Anggaran		
			Target		Realisasi	% Realisasi (capaian)	Target	Realisasi	% Realisasi (capaian)
							(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
		Persentase Pelayanan Kesehatan KDH/WKDH yang sesuai ketentuan	100	Persen	100	100			
		Persentase Penyediaan dan Penatausahaan Dana Penunjang Operasional KDH/WKDH tepat waktu dan sesuai ketentuan	100	Persen	100	100			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	24	Orang/Bulan	24	100	170.574.556	166.581.352	97,66
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	9	Paket	9	100	108.475.000	99.900.000	92,09
	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	6	Orang	6	100	150.000.000	149.999.994	100,00
	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	24	Orang/Bulan	24	100	600.000.000	600.000.000	100,00
	Fasilitasi Kerumah Tanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Pelayanan Kerumah tanggaan Sekretariat Daerah yang sesuai ketentuan	100	Persen	100	100	1.859.909.700	1.707.745.394	91,82
		Persentase Pelayanan Kerumah tanggaan WKDH yang sesuai ketentuan	100	Persen	100	100			
		Persentase Pelayanan Kerumah tanggaan KDH yang sesuai ketentuan	100	Persen	100	100			

No	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja				Anggaran		
			Target		Realisasi	% Realisasi (capaian)	Target	Realisasi	% Realisasi (capaian)
							(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	7	Paket	7	100	525.960.000	454.830.100	86,48
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	6	Paket	6	100	240.676.000	220.016.774	91,42
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	17	Paket	17	100	1.093.273.700	1.032.898.520	94,48
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Pendokumentasian Tugas Pimpinan yang diselesaikan	100	Persen	100	100	2.232.973.100	2.036.020.940	91,18
		Persentase Fasilitas Komunikasi Pimpinan yang diselesaikan	100	Persen	100	100			
		Persentase Fasilitas keprotokolan kepada Pimpinan yang dilaksanakan	100	Persen	100	100			
	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12	Laporan	12	100	1.671.975.000	1.505.282.440	90,03
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12	Laporan	12	100	232.344.100	213.882.820	92,05
	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1	Laporan	1	100	328.654.000	316.855.680	96,41
3	Meningkatnya Pengkoordinasian Dalam Penyelenggaraan Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase Pengkoordinasian Dalam Penyelenggaraan Perekonomian Dan Pembangunan	100	Nilai	100	100	651.154.100	527.760.340	81,05
		Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	40	Indeks	63,1	157,75	799.699.700	707.928.656	88,52
	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Pengkoordinasian Dalam Penyelenggaraan Perekonomian Dan Pembangunan	100	Persen	100	100	651.154.100	527.760.340	81,05

No	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja				Anggaran		
			Target		Realisasi	% Realisasi (capaian)	Target	Realisasi	% Realisasi (capaian)
							(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
		Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	40	Indeks	63,1	157,75	799.699.700	707.928.656	88,52
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Fasilitasi dan koordinasi Kebijakan lingkup urusan perekonomian.	100	Persen	100	100	448.491.500	342.418.200	76,35
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	15	Dok	13	87	327.677.800	249.170.100	76,04
	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4	Laporan	4	100	120.813.700	93.248.100,00	77,18
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase keberhasilan Fasilitasi dan Koordinasi pelaksanaan pembangunan daerah	100	Persen	100	100	167.309.700	154.353.540	92,26
	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	4	Dok	4	100	28.780.700	24.155.700,00	83,93
	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	4	Laporan	4	100	21.817.600	19.662.600	90,12
	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	2	Laporan	2	100	116.711.400	110.535.240	94,71
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pemenuhan Kriteria Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa yang baik	20	Persen	63,1	315,5	799.699.700	707.928.656	88,52
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	5	Dok	5	100	129.242.000	119.354.400	92,35

No	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja				Anggaran		
			Target		Realisasi	% Realisasi (capaian)	Target	Realisasi	% Realisasi (capaian)
							(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	5	Dok	5	100	540.683.700	466.323.956	86,25
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	68	Orang	120	176,470582	129.774.000	122.250.300	94,20
	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase fasilitasi kebijakan SDA	100	Persen	100	100	35.352.900	30.988.600	87,66
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	2	Dok	2	100	10.693.900	8.263.600	77,27
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	96	Dok	94	97,9166667	24.659.000	22.725.000	92,16
TOTAL BELANJA LANGSUNG UTAMA							3.266.094.300	2.826.296.300	86,53
BELANJA LANGSUNG PENDUKUNG							46.922.863.652	43.772.074.360	93,29
BELANJA TIDAK LANGSUNG						

Secara keseluruhan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dianggarkan pada tahun 2022 dengan persentase sebesar 93,29% telah dapat memenuhi tujuan dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan. Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan mengenai realisasi program kegiatan, dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut:
 - a. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 - b. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - c. Program Perekonomian dan Pembangunan
- 2) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD, adalah sebagai berikut:
 - a. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai dengan Renstra Sekretariat Daerah berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada Sekretariat Daerah.
 - b. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai dengan Renstra Sekretariat Daerah berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan SKPD.
 - c. Tidak tercapainya target kinerja program berimplikasi terhadap target kinerja sasaran dan kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang telah ditetapkan dalam Renstra.
 - d. Pada perencanaan kegiatan harus melihat hasil dan dampak dari program kegiatan, dengan tidak melihat berapa besar anggaran yang akan disediakan untuk program kegiatan.
 - e. Tersedianya informasi/data yang memadai dalam penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar.
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut diatas adalah dengan melakukan koordinasi dari pihak-pihak terkait mengenai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target yang diharapkan.

Pada tahun 2023 Sekretariat Daerah melaksanakan 3 Program, 19 Kegiatan dan 55 Sub Kegiatan. Sedangkan pada tahun 2024 Sekretariat Daerah melaksanakan 3 Program, 19 Kegiatan dan 57 Sub Kegiatan. Pencapaian kinerja tahun 2023 dapat diketahui guna mengembangkan organisasi ke depan dengan cara dilakukan pengukuran kinerja pada kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan indikator dan target yang telah

ditetapkan. Pengukuran kinerja selain sebagai upaya pengembangan organisasi kedepan juga sebagai sistem koreksi performa masing– masing bagian di lingkup Sekretariat Daerah. Sedangkan pencapaian kinerja tahun 2023 performa dari masing–masing bagian tidak dapat diperoleh secara spesifik karena pengukuran kinerja Sekretariat Daerah masih berjalan. Indikator kinerja dari kegiatan dijelaskan berdasarkan masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*) sebagaimana tertuang pada Tabel 2.2. sebagai berikut :

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah dan Pencapaian Renstra
Sekretariat Daerah s/d Tahun 2023 Kabupaten Banjar

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2026(akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun Tahun 2021(n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2022(tahun lalu/n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2023 Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dgn tahun 2023 (tahun berjalan/n-1)						
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022(n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022(n-2)	Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023 (tahun n-1)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023 (tahun n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)					
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)					
TAHUN 2021															
4	01	01													
4	01	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	0	82,27	80,9	82,27	110	0	0	0
4	01	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun sesuai ketentuan	0	4	4	4	85	0	0	0
							Jumlah dokumen anggaran dan belanja yang diverifikasi	0	4	4	4		0	0	0
4	01	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen kinerja Setda sesuai ketentuan	0	4	4	7	76	0	0	0
4	01	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan evaluasi Kinerja	0	4	4	5	285	0	0	0
4	01	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Jumlah ASN Setda yang mendapat pelayanan gaji tunjangan dan tambahan penghasilan	0	0	100	25	0	0	0	0

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2026(akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun Tahun 2021(n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2022(tahun lalu/n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1). Tahun 2023 Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dgn tahun 2023 (tahun berjalan/n-1)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022(n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022(n-2)	Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023 (tahun n-1)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023 (tahun n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Persentase pelayanan penyelenggaraan administrasi perkantoran yang terlayani	0	100	100	125		0	0	0
4	01 01 2 02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	0	0	120	120	18	0	0	0
4	01 01 2 02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0	19	32	23	162	0	0	0
4	01 01 2 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	0	25	60	66	0	0	0
4	01 01 2 05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0	160	80	160	66	0	0	0
4	01 01 2 06	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0	0	0	0	0	0
4	01 01 2 06 01	Administrasi Umum Perangkat Daerah	0	100	100	125	17	0	0	0
4	01 01 2 06 02	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0	12	12	15	123	0	0	0
4	01 01 2 06 08	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	12	12	15	109	0	0	0
4	01 01 2 06 09	Fasilitasi Kunjungan Tamu	0	12	12	15	46	0	0	0
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	11	11	14	3	0	0	0
4	01 01 2 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0	100	25	19	0	0	0

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2026(akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun Tahun 2021(n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2022(tahun lalu/n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2023 Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dgn tahun 2023 (tahun berjalan/n-1)							
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022(n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022(n-2)	Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023 (tahun n-1)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023 (tahun n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)						
1			2			3			4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4	01	01	2	07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Operasional	0	0	2	0	0	0	0	0	0
						Pengadaan Kendaraan dinas Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	01	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Aset Meubuler yang tercatat	0	12	12	15	157	0	0	0	0
4	01	01	2		08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran	0	100	25	125	97	0	0	0	0
4	01	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat yang masuk dan keluar	0	12	12	15	531	0	0	0	0
4	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah gedung yang Terlayani Kebutuhan Listrik, Air dan Telepon	0	6	12	12	120	0	0	0	0
4	01	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	0	12	12	15	84	0	0	0	0
4	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pelayanan jasa Kebersihan Kantor	0	12	12	15	76	0	0	0	0
							Pelayanan Event Hari-Hari Besar yang Difasilitasi	0	100	90	125		0	0	0	0
4	01	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran	0	100	25	125	82	0	0	0	0
4	01	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pelayanan Pemeliharaan Mobil Jabatan KDHWKDH	0	4	4	4	38	0	0	0	0
4	01	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Layanan Perizinan Operasional Kendaraan Bermotor	0	69	115	69	190	0	0	0	0
							Jumlah Pelayanan Operasional Kendaraan Bermotor	0	116	115	116		0	0	0	0

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan					Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2026(akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun Tahun 2021(n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2022(tahun lalu/n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2023 Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dgn tahun 2023 (tahun berjalan/n-1)																																																				
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022(n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022(n-2)	Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023 (tahun n-1)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023 (tahun n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)																																																			
1						2						3						4						5						6						7						8=(7/6)						9						10=(5+7+9)						11=(10/4)					
4	01	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0	12	3	5	0	0	0																																																		
4	01	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pelayanan Pemeliharaan Gedung Kantor Lainnya	0	12	12	15	89	0	0	0																																																		
4	01	01	2	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pelayanan Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	0	12	12	15	20	0	0	0																																																		
4	01	01	2	09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pelayanan Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	0	12	12	15	31	0	0	0																																																		
4	01	01	2	11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran	0	100	100	125	37	0	0	0																																																		
4	01	01	2	11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Gaji & Tunjangan Kepala Daerah/ Wakil	0	0	12	3	21	0	0	0																																																		
4	01	01	2	11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	0	26	14	40	141	0	0	0																																																		
							Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu KDH/WKDH	0	14	14	28		0	0	0																																																		
4	01	01	2	11	03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Pelayanan Pemeliharaan Jaminan Kesehatan KHD/WKDH	0	12	12	15	12	0	0	0																																																		
4	01	01	2	11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pelayanan Operasional KDH/WKDH	0	0	12	3	25	0	0	0																																																		
4	01	01	2	12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah		0	0	100	25	14	0	0	0																																																		

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2026(akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun Tahun 2021(n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2022(tahun lalu/n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2023 Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dgn tahun 2023 (tahun berjalan/n-1)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022(n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022(n-2)	Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023 (tahun n-1)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023 (tahun n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4 01 01 2 12 01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Pelayanan Pemeliharaan Rumah Jabatan KDH/WKDH	0	12	12	15	84	0	0	0
4 01 01 2 12 02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pelayanan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Bupati	0	0	13	3	10	0	0	0
4 01 01 2 12 03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Fasilitasi Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian	0	0	90	25	15	0	0	0
		Tersedianya makanan dan minuman	0	0	12	3		0	0	0
4 01 01 2 13 01	Penataan Organisasi	Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran	0	100	100	125	41	0	0	0
4 01 01 2 13	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen/laporan Evaluasi kelembagaan yang telah disusun	0	3	1	3	35	0	0	0
		Jumlah Dokumen Penataan Sumber Daya Aparatur	0	4	1	4		0	0	0
4 01 01 2 13 02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen ketatalaksanaan dan pelayanan publik yang dievaluasi	0	3	2	4	126	0	0	0
4 01 01 2 13 03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen Reformasi Birokrasi	0	0	1	-	8	0	0	0
		Laporan hasil koordinasi	0	1	4	1		0	0	0
4 01 01 2 14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran	0	100	100	125	105	0	0	0
4 01 01 2 14 01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Kegiatan Hari-hari Besar Nasional dan hari jadi yang diselenggarakan	0	0	10	0	3	0	0	0

Kode	Usuran/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2026(akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun Tahun 2021(n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2022(tahun lalu/n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2023 Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dgn tahun 2023 (tahun berjalan/n-1)						
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022(n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022(n-2)	Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023 (tahun n-1)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023 (tahun n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)					
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)					
		Jumlah Kegiatan Yang mendapat Pelayanan Keprotokolan	0	315	330	465		0	0	0					
		Jumlah Pelayanan perjalanan dinas KDHWKDH yang dilayani	0	12	1	15		0	0	0					
4	01	01	2	14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Naskah Sambutan/Pidato	0	339	350	410	296	0	0	0
		Jumlah Perjalanan Setda yang dilayani	0	12	12	15		0	0	0	0				
4	01	01	2	14	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Dokumentasi pimpinan	0	0	440	175	20	0	0	0
4	01	02				PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		0	0	0	0	34	0	0	0
4	01	02	2	01		Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Keterisian Data Indikator Kinerja Kunci (IKK)	0	100	0	200	104	0	0	0
		Rata-Rata IKM Kecamatan	0	85	0	85		0	0	0	0		0	0	0
4	01	02	2	01	01		Persentase Permasalahan Segmen Batas Wilayah Yang Diselesaikan	0	0	0	0		0	0	0
4	01	02	2	01	02	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Laporan Koordinasi Lingkup Urusan Pemerintahan Yang disusun	0	1	1	1	136	0	0	0
		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	0	1	1	1		0	1	1	1	105	0	0	0

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2026(akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun Tahun 2021(n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2022(tahun lalu/n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2023 Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dgn tahun 2023 (tahun berjalan/n-1)						
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022(n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022(n-2)	Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023 (tahun n-1)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023 (tahun n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)					
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)					
		Jumlah Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	2 Laporan	0	2	4		0	0	0					
		Jumlah laporan movev batas wilayah	4 Laporan	0	4	5		0	0	0					
		Jumlah pembangunan patok batas wilayah	10 patok	0	10	5		0	0	0					
		Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Dana Kelurahan	1 Laporan	0	1	1		0	0	0					
4	01	02	2	01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen LPPD dan EKPPD yang diverifikasi	0	2	2	3	87	0	0	0
4	01	02	2	02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah ZIS yang terkumpul	0	2.033.314.132	699.840.000	2512641783	27	0	0	0
							Persentase Kegiatan Keagamaan yang terfasilitasi	0	100%	100%	0		0	0	0
4	01	02	2	02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Kegiatan Keagamaan & Hari-hari Besar Keagamaan	0	3	8	4	37	0	0	0
4	01	02	2	02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Lingkup Urusan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Yang Disusun	0	3	7	4	5,07	0	0	0
							Jumlah laporan movev bantuan hibah	0	1	2	1		0	0	
							Jumlah UPZ yang dibina	-	34	34	68		-	-	

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2026(akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun Tahun 2021(n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2022(tahun lalu/n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2023 Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dgn tahun 2023 (tahun berjalan/n-1)						
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022(n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022(n-2)	Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023 (tahun n-1)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023 (tahun n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)					
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4	01	02	2	02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Ulama & Toko Masyarakat yang mendapat Pelayanan Kesehatan	-	45	60	105	11	-	-	-
4	01	02	2	03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase peraturan yang disahkan	-	100	100	125	73	-	-	-
							Persentase Dokumen Peraturan Perundang-undangan Yang Dipublikasikan	-	100	100	125		-	-	
							Persentase Terasiliasi Permasalahan Hukum Yang Tertangani	-	100	100	125		-	-	
4	01	02	2	03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Dokumen Program Pembentukan Peraturan Daerah	-	1	1	2	61	-	-	-
							Jumlah Rancangan Produk Hukum Daerah Yang Berbentuk Peraturan dan Penetapan	-	501	550	759	-	-	-	
4	01	02	2	03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Laporan asistensi kontrak drafting kesepakatan bersama atau perjanjian	-	12	15	37	109	-	-	-
							Jumlah Pemberian bantuan hukum dalam pelaksanaan proses penyelesaian perkara yang dihadapi Pemerintah Daerah	-	5	5	7	-	-		
							Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)	-	5	4	5	-	-	-	

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan					Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2026(akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun Tahun 2021(n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2022(tahun lalu/n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2023 Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dgn tahun 2023 (tahun berjalan/n-1)								
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022(n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022(n-2)	Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023 (tahun n-1)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023 (tahun n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)							
1						2						3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4	01	02	2	03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Dokumentasi Produk Hukum Daerah	-	501	500	642	24	-	-	-						
							Jumlah Media Publikasi	-	1	1	2		-	-							
4	01	02	2	04		Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Pihak Terkait Yang ditindaklanjuti	-	100	-	100	85	-	-	-						
4	01	02	2	04	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah fasilitasi dan koordinasi kerjasama daerah	-	10	10	35	13	-	-	-						
							Jumlah laporan monev kerjasama antar daerah	-	4	1	4		-	-	-						
4	01	03				PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		-	-	100	-	12	-	-	-						
4	01	03	2	01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase BUMD yang sehat	-	100	100	125	53	-	-	-						
4	01	03	2	01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah BUMD dan BLUD yang difasilitasi dan dievaluasi	-	13	13	19	29	-	-	-						
4	01	03	2	01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan TPID yang disusun	-	4	4	5	85	-	-	-						
4	01	03	2	02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Administrasi Pembangunan yang dibuat	-	-	100%	25	12	-	-	-						
4	01	03	2	02	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Laporan Penyusunan Kegiatan Pembangunan	-	-	1	-	2	-	-	-						
4	01	03	2	02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Pengendalian Pembangunan	-	-	4	1	1	-	-	-						

Kode							Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2026(akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun Tahun 2021(n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2022(tahun lalu/n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2023 Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dgn tahun 2023 (tahun berjalan/n-1)	
											Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022(n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022(n-2)	Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023 (tahun n-1)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023 (tahun n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1							2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4	01	03	2	02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan	-	-	4	1	16	-	-	-	
4	01	03	2	03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase paket Pengadaan barang dan Jasa yang tepat waktu	-	-	92	82,62	125	-	-	-		
4	01	03	2	03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Kontrak yang sesuai Ketentuan	-	4	4	5	104	-	-	-	
						Jumlah Laporan Paket lelang yang disusun sesuai ketentuan	-	3	4	4		-	-	-		
4	01	03	2	03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah SKPD yang menyampaikan dan mengumumkan RUP Tepat Waktu	-	50	54	87	114	-	-	-	
4	01	03	2	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Pengelolaan PBJ yang mengikuti Peningkatan Kapasitas	-	55	54	67	237	-	-	-		
4	01	03	2	04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase kebijakan lingkup urusan perekonomian yang terlaksana	-	-	100	25	14	-	-	-		
4	01	03	2	04	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Laporan Kegiatan pemantauan kebijakan terkait sumber daya alam	-	-	2	-	5	-	-	-	
4	01	03	2	04	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Pemantauan dan evaluasi energi dan air	-	-	2	-	19	-	-	-	

Kode						Usuran/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2026(akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun Tahun 2021(n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2022(tahun lalu/n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2023 Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dgn tahun 2023 (tahun berjalan/n-1)	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022(n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022(n-2)	Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023 (tahun n-1)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023 (tahun n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pengkoordinasian Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum Indikator Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	100 Persen 100 Nilai	-	100 persen 80 Nilai	100 persen 89.02 Nilai	100 111	80 persen 84 Nilai 70 Nilai 100 persen	-	-
4	01	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Setda Persentase Bagian yang Berkinerja Baik Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Akuntabel Persentase Perencanaan dan Penganggaran yang Efektif dan Efesien	82,5 Nilai 100 persen 100 persen 100 persen	-	81,5 Nilai 100 persen 100 persen 100 persen	81,5 Nilai 100 persen 100 persen 100 persen	100 100 100 100	81,75 Nilai 100 persen 100 persen 100 persen	-	-
4	01	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 Dokumen	-	13 Dokumen	13 Dokumen	100	14 Dokumen	-	-
4	01	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	-	4 Laporan	4 Laporan	100	7 Laporan	-	-

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan					Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2026(akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun Tahun 2021(n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2022(tahun lalu/n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2023 Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dgn tahun 2023 (tahun berjalan/n-1)		
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022(n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022(n-2)	Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023 (tahun n-1)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023 (tahun n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4	01	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29 Laporan	-	29 Laporan	28 Laporan	96,55	29 Laporan	-	-
4	01	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan yang Tertib Administrasi	100 persen	-	100 persen	100 persen	100	100 persen	-	-
4	01	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	117 orang/bulan	-	117 orang/bulan	117 orang/bulan	100	117 orang/bulan	-	-
4	01	01	2	02	03	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	-	12 Dokumen	12 Dokumen	100	12 Dokumen	-	-
4	01	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 persen	-	100 persen	100 persen	100	85 persen	-	-
							Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terlayani	100 persen	-	100 persen	100 persen	100			
4	01	01	2	05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	160 orang	-	80 orang	80 orang	100	80 orang	-	-
4	01	01	2	05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25 orang	-	25 orang	25 orang	100	20 orang	-	-

Kode	Usuran/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2026(akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun Tahun 2021(n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2022(tahun lalu/n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2023 Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dgn tahun 2023 (tahun berjalan/n-1)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022(n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022(n-2)	Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023 (tahun n-1)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023 (tahun n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4 01 01 2 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlayani	100 persen	-	100 persen	100 persen	100	100 persen	-	-
4 01 01 2 06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 paket	-	6 paket	6 paket	100	6 paket	-	-
4 01 01 2 06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	28 paket	-	17 paket	17 paket	100	28 paket	-	-
4 01 01 2 06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	-	4 Laporan	4 Laporan	100	4 Laporan	-	-
4 01 01 2 06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	-	2 Laporan	2 Laporan	100	2 Laporan	-	-
4 01 01 2 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang Sesuai Ketentuan	100 persen	-	100 persen	100 persen	100	100 persen	-	-
4 01 01 2 07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 unit	-	1 unit	1 unit	100	1 unit	-	-
4 01 01 2 07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 unit	-	3 unit	3 unit	100	5 unit	-	-
4 01 01 2 07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Paket	-	4 Paket	4 Paket	100	7 Paket	-	-

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan					Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2026(akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun Tahun 2021(n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2022(tahun lalu/n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2023 Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dgn tahun 2023 (tahun berjalan/n-1)		
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022(n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022(n-2)	Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023 (tahun n-1)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023 (tahun n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4	01	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Sesuai Ketentuan	100 persen	-	100 persen	100 persen	100	100 persen	-	-
4	01	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	-	2 Laporan	2 Laporan	100	2 Laporan	-	-
4	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	-	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	-	-
4	01	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	-	2 Laporan	2 Laporan	100	2 Laporan	-	-
4	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	-	13 Laporan	13 Laporan	100	4 Laporan	-	-
4	01	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang sesuai ketentuan	100 persen	-	100 persen	100 persen	100	100 persen	-	-

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2026(akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun Tahun 2021(n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2022(tahun lalu/n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2023 Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dgn tahun 2023 (tahun berjalan/n-1)						
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022(n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022(n-2)	Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023 (tahun n-1)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023 (tahun n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)					
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4	01	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	38 unit	-	38 unit	38 unit	100	38 unit	-	-
4	01	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	121 unit	-	121 unit	121 unit	100	120 unit	-	-
4	01	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 unit	-	16 unit	16 unit	100	20 unit	-	-
4	01	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	6 unit	-	6 unit	6 unit	100	6 unit	-	-
4	01	01	2	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	6 unit	-	6 unit	6 unit	100	6 unit	-	-
4	01	01	2	09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	250 unit	-	250 unit	250 unit	100	264 unit	-	-

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2026(akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun Tahun 2021(n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2022(tahun lalu/n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2023 Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dgn tahun 2023 (tahun berjalan/n-1)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022(n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022(n-2)	Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023 (tahun n-1)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023 (tahun n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4 01 01 2 11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase penyediaan dan Penatausahaan Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH tepat waktu dan sesuai ketentuan Persentase Pelayanan Kesehatan KDH/WKDH yang sesuai ketentuan Persentase Pengadaan Pakaian Dinas KDH/WKDH yang sesuai ketentuan Persentase Penyediaan dan Penatausahaan Dana Penunjang Operasional KDH/ WKDH tepat waktu dan sesuai ketentuan	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	-	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	100 100 100 100	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	-	-
4 01 01 2 11 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	24 orang/bulan	-	24 orang/bulan	24 orang/bulan	100	24 orang/bulan	-	-
4 01 01 2 11 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	9 paket	-	9 paket	9 paket	100	9 paket	-	-

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2026(akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun Tahun 2021(n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2022(tahun lalu/n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2023 Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dgn tahun 2023 (tahun berjalan/n-1)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022(n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022(n-2)	Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023 (tahun n-1)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023 (tahun n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4 01 01 2 11 03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	6 orang	-	6 orang	6 orang	100	7 orang	-	-
4 01 01 2 11 04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	24 orang/bulan	-	24 orang/bulan	24 orang/bulan	100	24 orang/bulan	-	-
4 01 01 2 12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Pelayanan Kerumahtanggaan KDH yang Sesuai Ketentuan Persentase Pelayanan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang Sesuai Ketentuan Persentase Pelayanan Kerumahtanggaan WKDH yang Sesuai Ketentuan	100 persen 100 persen 100 persen	-	100 persen 100 persen 100 persen	100 persen 100 persen 100 persen	100 100 100	100 persen 100 persen 100 persen	-	-
4 01 01 2 12 01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	7 paket	-	7 paket	7 paket	100	7 paket	-	-
4 01 01 2 12 02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	6 paket	-	6 paket	6 paket	100	6 paket	-	-
4 01 01 2 12 03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	17 paket	-	17 paket	17 paket	100	17 paket	-	-

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2026(akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun Tahun 2021(n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2022(tahun lalu/n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2023 Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dgn tahun 2023 (tahun berjalan/n-1)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022(n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022(n-2)	Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023 (tahun n-1)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023 (tahun n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4 01 01 2 13	Penataan Organisasi	Tingkat efesiensi unit dan prestasi kerja unit Kab.Banjar bernilai Baik Persentase pengelolaan tatalaksana Persentase PD yang pelayanan publik bernilai Baik Persentase PD pengelolaan RB bernilai Baik Persentase PD SAKIP bernilai Baik	1,3 Nilai 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	-	1,3 Nilai 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	1,4 Nilai 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	100 100 100 100 100	84 Nilai 70 Nilai	-	-
4 01 01 2 13 01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	9 Dokumen	-	9 Dokumen	9 Dokumen	100	9 Dokumen	-	-
4 01 01 2 13 02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	6 Laporan	-	6 Laporan	6 Laporan	100	6 Laporan	-	-
4 01 01 2 13 03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	7 Dokumen	-	7 Dokumen	7 Dokumen	100	7 Dokumen	-	-
4 01 01 2	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Fasilitasi Keprotokolan kepada Pimpinan Persentase Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Persentase Pendokumentasian Tugas Pimpinan	100 persen 100 persen 100 persen	-	100 persen 100 persen 100 persen	100 persen 100 persen 100 persen	100 100 100	85 persen	-	-

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan					Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2026(akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun Tahun 2021(n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2022(tahun lalu/n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2023 Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dgn tahun 2023 (tahun berjalan/n-1)		
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022(n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022(n-2)	Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023 (tahun n-1)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023 (tahun n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4	01	01	2	14	01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan	-	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	-	-
4	01	01	2	14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	-	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	-	-
4	01	01	2	14	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 Laporan	-	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	-	-
4	01	02				PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Nilai LPPD Persentase Pengkoordinasian Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat	3,2005 Nilai 100 persen	-	3,1000 Nilai 100 persen	3,5069 Nilai 100 persen	113 100	3,1000 Nilai	-	-
4	01	02	2	01		Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Terselenggaranya Administrasi Pemerintahan Persentase Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Persentase Fasilitasi, Koordinasi, dan Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	100 persen 100 persen 100 persen	-	100 persen 100 persen 100 persen	100 persen 100 persen 100 persen	100 100 100	3,1000 Nilai	-	-
4	01	02	2	01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	4 Dokumen	-	4 Dokumen	4 Dokumen	100	4 Dokumen	-	-

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2026(akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun Tahun 2021(n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2022(tahun lalu/n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2023 Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dgn tahun 2023 (tahun berjalan/n-1)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022(n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022(n-2)	Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023 (tahun n-1)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023 (tahun n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4 01 02 2 01 02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	4 Dokumen	-	4 Dokumen	4 Dokumen	100	4 Dokumen	-	-
4 01 02 2 01 03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	5 Dokumen	-	5 Dokumen	5 Dokumen	100	5 Dokumen	-	-
4 01 02 2 02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase fasilitasi dan koordinas di bidang kesejahteraan masyarakat yang sesuai ketentuan Persentase fasilitasi dan koordinasi di bidang kesejahteraan sosial yang sesuai ketentuan Persentase fasilitasi dan koordinasi di bidang bina mental dan spiritual keagamaan	100 persen 100 persen 100 persen	-	100 persen 100 persen 100 persen	100 persen 100 persen 100 persen	100 100 100	100 persen	-	-
4 01 02 2 02 01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	8 Dokumen	-	8 Dokumen	6 Dokumen	75	8 Dokumen	-	-
4 01 02 2 02 02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan,	4 Dokumen	-	3 Dokumen	3 Dokumen	100	4 Dokumen	-	-

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2026(akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun Tahun 2021(n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2022(tahun lalu/n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2023 Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dgn tahun 2023 (tahun berjalan/n-1)						
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022(n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022(n-2)	Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023 (tahun n-1)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023 (tahun n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)					
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)					
		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB													
4	01	02	2	02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	2 Dokumen	-	3 Dokumen	3 Dokumen	100	2 Dokumen	-	-
4	01	02	2	03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun Persentase Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	100 persen 100 persen	-	100 persen 100 persen	100 persen 100 persen	100 100	100 persen 100 persen	-	-

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2026(akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun Tahun 2021(n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2022(tahun lalu/n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2023 Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dgn tahun 2023 (tahun berjalan/n-1)						
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022(n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022(n-2)	Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023 (tahun n-1)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023 (tahun n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)					
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)					
		Persentase Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	100 persen		100 persen	100	100 persen								
4	01	02	2	03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	550 Dokumen	-	550 Dokumen	887 Dokumen	161	550 Dokumen	-	-
4	01	02	2	03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	5 Kasus	-	5 Kasus	6 Kasus	120	5 Kasus	-	-
4	01	02	2	03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	500 Dokumen	-	500 Dokumen	801 Dokumen	160	500 Dokumen	-	-
4	01	02	2	04		Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase Kerjasama Daerah Dengan Pihak Terkait Yang Ditindaklanjuti	100 persen	-	100 persen	100 persen	100	100 persen	-	-
4	01	02	2	04	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	-	-
4	01	03	2	01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Fasilitasi dan koordinasi Kebijakan lingkup urusan perekonomian.	100 persen	-	100 persen	100 persen	100	100 persen	-	-

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan					Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2026(akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun Tahun 2021(n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2022(tahun lalu/n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2023 Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dgn tahun 2023 (tahun berjalan/n-1)		
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022(n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022(n-2)	Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023 (tahun n-1)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023 (tahun n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4	01	03	2	01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	12 Dokumen	-	12 Dokumen	12 Dokumen	100	12 Dokumen	-	-	
4	01	03	2	01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Laporan	-	4 Laporan	4 Laporan	100	4 Laporan	-	-	
4	01	03	2	02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	100 persen	-	100 persen	100 persen	100	100 persen	-	-	
4	01	03	2	02	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	4 Dokumen	-	4 Dokumen	4 Dokumen	100	4 Dokumen	-	-	
4	01	03	2	02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	4 Laporan	-	4 Laporan	4 Laporan	100	4 Laporan	-	-	
4	01	03	2	02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan	-	2 Laporan	2 Laporan	100	2 Laporan	-	-	
4	01	03	2	03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	100 persen	-	20 persen	63,1 persen	316	40 skor/nilai	-	-	

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2026(akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun Tahun 2021 (n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2022(tahun lalu/n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2023 Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dgn tahun 2023 (tahun berjalan/n-1)						
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022(n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022(n-2)	Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023 (tahun n-1)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023 (tahun n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)					
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4	01	03	2	03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	5 Dokumen	-	5 Dokumen	5 Dokumen	100	5 Dokumen	-	-
4	01	03	2	03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	5 Dokumen	-	5 Dokumen	5 Dokumen	100	5 Dokumen	-	-
4	01	03	2	03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	105 orang	-	68 orang	120 orang	176	68 orang	-	-
4	01	03	2	04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase fasilitasi kebijakan SDA	100 persen	-	100 persen	100 persen	100	100 persen	-	-
4	01	03	2	04	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	2 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	-	-
4	01	03	2	04	02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	94 Dokumen	-	94 Dokumen	94 Dokumen	100	94 Dokumen	-	-

II.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

Dalam rangka menjalankan fungsi sebagai administrator dan fasilitator yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel, Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar berupaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan cara melaksanakan tugas dan kewajiban Sekretariat Daerah dalam rangka membantu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan serta mengkoordinasikan, memfasilitasi dan sinkronisasi dengan dinas dan lembaga teknis daerah. Tujuan Rencana Sekretariat Daerah berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 adalah Terselenggaranya Reformasi Dalam Perencanaan, Penganggaran Dan Akuntabilitas Kinerja.

Penyusunan Rencana Kerja tahun anggaran 2024 sampai dengan tahun berakhirnya renstra disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Untuk mendukung tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dimaksud, diperlukan kinerja pelayanan yang terdiri dari :

- 1) Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan sinkronisasi bidang hukum, pemerintahan, kesejahteraan sosial, pembangunan, perekonomian, layanan pengadaan, hubungan kemasyarakatan, organisasi, serta umum;
- 2) Penyelenggaraan koordinasi, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pada lingkup Sekretariat Daerah;
- 3) Melakukan koordinasi, fasilitasi dan sinkronisasi dengan seluruh SKPD;
- 4) Pelayanan teknis administratif Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan seluruh SKPD di lingkup Pemerintahan Kabupaten Banjar.

Adapun untuk Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar dapat dilihat pada tabel II.3 di bawah ini.

Tabel II.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar

No	Indikator Program	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Persentase Pengkoordinasian Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat			Tidak Menjadi Indikator	100%	100%	100%	100%	Tidak Menjadi Indikator	100%	NA	100%	100%	
2	Nilai LPPD			Tidak Menjadi Indikator	3,1 Nilai	3,1250 Nilai	3,15 Nilai	3,175	Tidak Menjadi Indikator	3,5069	NA	3,1250 Nilai	3,175 Nilai	
3	Persentase Pengkoordinasian Dalam Penyelenggaraan Perekonomian Dan Pembangunan			Tidak Menjadi Indikator	100%	100%	100%	100%	Tidak Menjadi Indikator	100%	NA	100%	100%	
4	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah			Tidak Menjadi Indikator	40 Skor/Nilai	50 Skor/Nilai	60 Skor/Nilai	80 Skor/Nilai	Tidak Menjadi Indikator	63,1 Skor/Nilai	NA	50 Skor/Nilai	70 Skor/Nilai	
5	Persentase Pengkoordinasian Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum			Tidak Menjadi Indikator	100%	100%	100%	100%	Tidak Menjadi Indikator	100%	NA	100%	100%	
6	Indikator Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)			Tidak Menjadi Indikator	80 Nilai	85 Nilai	90 Nilai	95 Nilai	Tidak Menjadi Indikator	89,02 Nilai	NA	85 Nilai	95 Nilai	

II.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah

Permasalahan yang masih ada di tingkat pelayanan SKPD yang perlu diperhatikan adalah :

1. Sulit membangun kepercayaan masyarakat untuk menyalurkan zakat, infaq dan shadaqah melalui UPZ yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah;
2. Masih minimnya pengetahuan masyarakat mengenai prosedur permohonan bantuan sosial dan hibah;
3. Dalam pembinaan BUMD, belum terbitnya Peraturan Menteri yang mengatur secara teknis tentang pengelolaan BUMD;
4. Belum optimal Perangkat Daerah dalam pengajuan lelang dalam hal ini kelengkapan dokumen yang sesuai SIRUP;
5. Masih kurang jumlah SDM fungsional PBJ dalam melaksanakan lelang tepat waktu;
6. Pengelolaan Guest House Sultan Sulaiman yang belum profesional;
7. Dalam pembahasan Peraturan Daerah melibatkan pihak terkait yaitu Perangkat Daerah pemrakarsa dan DPRD, sehingga tidak bisa maksimal untuk mengejar target;
8. Masih terdapat indikator SPM yang memang tidak bisa dilaksanakan di daerah namun tetap menjadi perhitungan dalam capaian indikator SPM;
9. Masih kurang tanggapnya Perangkat Daerah penyelenggara pelayanan publik dalam melaporkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat;
10. Kurangnya pengetahuan tentang inovasi pelayanan untuk menunjang kegiatan- kegiatan di yang dilaksanakan agar lebih efektif dan efisien;
11. Dalam proses Evaluasi Pembentukan UPTD di Lingkup Kabupaten Banjar yang menjadi permasalahan adalah adanya fungsi UPTD yang sudah didefinisikan dalam peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah tetapi sudah sinkron dan tidak mengakomodir sesuai Uraian Tugas UPTD;
12. Masih kurangnya pemahaman dari SKPD mengenai nama jabatan yang sesuai dengan tugas jabatan dan pemilahan nama berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;

13. Belum ada kesepakatan pemilihan SKPD atau ASN yang dijadikan sebagai role model dan nilai dasar yang disepakati untuk diterapkan;
14. Kurang maksimalnya kegiatan asistensi yang dilaksanakan sehingga draf Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja yang harus direvisi atau diperbaiki kembali oleh Bagian Organisasi;
15. Banyak kegiatan yang tidak dilaksanakan Perangkat Daerah terkait reformasi birokrasi untuk perubahan di daerah agar menjadi lebih baik;
16. Keberadaan TKKSD (Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah) yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Kerjasama Daerah, belum sepenuhnya dipahami dan diimplementasikan oleh SKPD yang akan melaksanakan kerjasama;
17. Belum maksimalnya penegasan batas antar kabupaten (Banjar - Tanah Laut dan Banjar – Banjarbaru), antar kecamatan dan antar desa/kelurahan;
18. Ada beberapa pilar batas yang bergeser, rusak dan hilang sehingga sulit untuk menentukan batas secara akurat.

Dari berbagai isu penting tersebut, Sekretariat Daerah berusaha untuk mengatasi permasalahan-permasalahan dimana tugas pokok Sekretariat Daerah adalah untuk membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan Pembangunan, Pemerintahan dan Kemasyarakatan sebagai SKPD Pengkoordinasian atas Dinas-Dinas dan Badan-Badan Pelaksananya.

II.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 berkaitan dengan program dan kegiatan/ sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Proses review dilakukan dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan . Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel II.4 dibawah ini :

Tabel II.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2024

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kab. Banjar	Indikator Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Persentase Pengkoordinasian Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum	90 Nilai 100 persen	50.173.371.514	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kab. Banjar	Indikator Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Persentase Pengkoordinasian Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum	90 Nilai 100 persen	61.786.107.016	
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Banjar	Nilai SAKIP Setda Persentase Bagian yang Berkinerja Baik Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Akuntabel Persentase Perencanaan dan Penganggaran yang Efektif dan Efisien	82 Nilai 100 persen 100 persen 100 persen	368.199.168	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Banjar	Nilai SAKIP Setda Persentase Bagian yang Berkinerja Baik Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Akuntabel Persentase Perencanaan dan Penganggaran yang Efektif dan Efisien	82 Nilai 100 persen 100 persen 100 persen	69.999.700	
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Banjar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 Dokumen	232.599.168	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Banjar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 Dokumen	25.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Banjar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	100.600.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Banjar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	14.999.700	
5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Banjar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29 Laporan	35.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Banjar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28 Laporan	30.000.000	
6	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Banjar	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan yang Tertib Administrasi	100 Persen	18.864.100.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Banjar	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan yang Tertib Administrasi	100 Persen	16.919.381.406	
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Banjar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	117 Orang	18.742.500.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Banjar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	117 Orang/bulan	16.491.317.406	
8	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Banjar	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	121.600.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Banjar	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	428.064.000	
9	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Banjar	Persentase Jumlah Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terlayani	100 Persen 100 Persen	520.477.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Banjar	Persentase Jumlah Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terlayani	100 Persen 100 Persen	170.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Banjar	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	120 Orang	120.477.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Banjar	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	200 Orang	120.000.000	
11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Banjar	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25 Orang	400.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Banjar	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	80 Orang	50.000.000	
12	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Banjar	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlayani	100 Persen	5.166.652.646	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Banjar	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlayani	100 Persen	3.392.237.000	
13	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Banjar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	45.176.802	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Banjar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	45.174.000	
14	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Banjar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	14 Paket	593.524.844	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Banjar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	848.473.000	
15	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Banjar	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	27.951.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Banjar	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	27.940.000	
16	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Banjar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	4.500.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Banjar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	2.470.650.000	
17	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Banjar	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang Sesuai Ketentuan	100 Persen	5.201.407.450	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Banjar	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang Sesuai Ketentuan	100 Persen	8.461.550.000	
18	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Banjar	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1.933.011.300	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Banjar	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	9 Unit	4.349.380.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Pengadaan Mebel	Kab. Banjar	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Paket	268.396.150	Pengadaan Mebel	Kab. Banjar	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit	738.810.000	
20	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Banjar	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	3.000.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Banjar	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	16 Unit	3.373.360.000	
21	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Banjar	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Sesuai Ketentuan	100 Persen	6.425.241.822	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Banjar	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Sesuai Ketentuan	100 Persen	6.360.371.000	
22	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Banjar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	100.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Banjar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	36.250.000	
23	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Banjar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.577.022.040	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Banjar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.576.288.000	
24	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Banjar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	275.849.750	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Banjar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	275.833.000	
25	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Banjar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	4.472.370.032	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Banjar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	4.472.000.000	
26	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Banjar	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang sesuai ketentuan	100 Persen	4.166.256.270	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Banjar	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang sesuai ketentuan	100 Persen	4.625.754.100	
27	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Banjar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	38 Unit	934.362.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Banjar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	25 Unit	784.330.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Banjar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	121 Unit	2.130.997.550	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Banjar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	121 Unit	1.240.240.000	
29	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Banjar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit	66.550.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Banjar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit	65.000.000	
30	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Banjar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	139.755.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Banjar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	6 Unit	1.660.526.000	
31	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Banjar	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	472.505.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Banjar	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	6 Unit	453.980.000	
32	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Banjar	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	250 Unit	422.086.720	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Banjar	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	250 Unit	421.678.100	
33	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Banjar	Persentase penyediaan dan Penatausahaan Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH tepat waktu dan sesuai ketentuan Persentase Pelayanan Kesehatan KDH/WKDH yang sesuai ketentuan Persentase Pengadaan Pakaian Dinas KDH/WKDH yang sesuai ketentuan Persentase Penyediaan dan Penatausahaan Dana Penunjang Operasional KDH/WKDH tepat waktu dan sesuai ketentuan	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	1.070.173.700	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Banjar	Persentase penyediaan dan Penatausahaan Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH tepat waktu dan sesuai ketentuan Persentase Pelayanan Kesehatan KDH/WKDH yang sesuai ketentuan Persentase Pengadaan Pakaian Dinas KDH/ WKDH yang sesuai ketentuan Persentase Penyediaan dan Penatausahaan Dana Penunjang Operasional KDH/ WKDH tepat waktu dan sesuai ketentuan	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	1.155.029.360	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Banjar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	227.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Banjar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	24 Orang/Bulan	288.429.360	
35	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Banjar	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	9 Paket	123.383.700	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Banjar	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	9 Paket	135.600.000	
36	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Banjar	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	6 Orang	119.790.000	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Banjar	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	6 Orang	131.000.000	
37	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Banjar	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	600.000.000	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Banjar	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	24 Orang/Bulan	600.000.000	
38	Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Kab. Banjar	Persentase Pelayanan Kerumahtanggaan KDH yang Sesuai Ketentuan Persentase Pelayanan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang Sesuai Ketentuan Persentase Pelayanan Kerumahtanggaan WKDH yang Sesuai Ketentuan	100 Persen 100 Persen 100 Persen	3.799.583.872	Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Kab. Banjar	Persentase Pelayanan Kerumahtanggaan KDH yang Sesuai Ketentuan Persentase Pelayanan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang Sesuai Ketentuan Persentase Pelayanan Kerumahtanggaan WKDH yang Sesuai Ketentuan	100 Persen 100 Persen 100 Persen	3.799.296.950	
39	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Kab. Banjar	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	7 Paket	805.261.921	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Kab. Banjar	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	7 Paket	805.245.700	
40	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Kab. Banjar	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	6 Paket	480.950.994	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Kab. Banjar	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	6 Paket	480.713.000	
41	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Kab. Banjar	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	17 Paket	2.513.370.957	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Kab. Banjar	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	17 Paket	2.513.338.250	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	Penataan Organisasi	Kab. Banjar	Persentase PD Pengelolaan RB Bernilai Baik Persentase PD SAKIP Bernilai Baik Persentase PD yang Pelayanan Publik Bernilai Baik Persentase Pengelolaan Tatalaksana Tingkat Efisiensi Unit dan Prestasi Kerja Unit Kabupaten Banjar Bernilai Baik	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 1.3 Nilai	1.480.288.227	Penataan Organisasi	Kab. Banjar	Persentase PD Pengelolaan RB Bernilai Baik Persentase PD SAKIP Bernilai Baik Persentase PD yang Pelayanan Publik Bernilai Baik Persentase Pengelolaan Tatalaksana Tingkat Efisiensi Unit dan Prestasi Kerja Unit Kabupaten Banjar Bernilai Baik	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 1.3 Skor/Nilai	437.463.400	
43	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kab. Banjar	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	9 Dokumen	168.680.050	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kab. Banjar	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2 Dokumen	156.760.000	
44	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Banjar	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	6 Dokumen	228.253.916	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Banjar	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	5 Laporan	181.870.400	
45	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kab. Banjar	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	7 Dokumen	1.083.354.261	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kab. Banjar	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	7 Dokumen	98.833.000	
46	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kab. Banjar	Persentase Fasilitasi Keprotokolan kepada Pimpinan Persentase Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Persentase Pendokumentasian Tugas Pimpinan	100 Persen 100 Persen 100 Persen	3.110.991.359	Pelaksanaan Protokol Dan Komunikasi Pimpinan	Kab. Banjar	Persentase Fasilitasi Keprotokolan kepada Pimpinan Persentase Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Persentase Pendokumentasian Tugas Pimpinan	100 Persen 100 Persen 100 Persen	2.378.207.600	
47	Fasilitasi Keprotokolan	Kab. Banjar	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan	2.109.787.460	Fasilitasi Keprotokolan	Kab. Banjar	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan	1.997.177.200	
48	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kab. Banjar	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	551.704.219	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kab. Banjar	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	251.703.900	
49	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kab. Banjar	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 Laporan	49.499.680	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kab. Banjar	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 Laporan	129.326.500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kab. Banjar	Nilai LPPD Persentase Pengkoordinasian Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat	3.15 Nilai 100 Persen	11.891.336.089	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kab. Banjar	Nilai LPPD Persentase Pengkoordinasian Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat	3.15 Nilai 100 Persen	12.880.981.300	
51	Administrasi Tata Pemerintahan	Kab. Banjar	Persentase Fasilitas, Koordinasi, dan Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Persentase Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Persentase Terselenggaranya Administrasi Pemerintahan	100 Persen 100 Persen 100 Persen	677.104.441	Administrasi Tata Pemerintahan	Kab. Banjar	Persentase Fasilitas, Koordinasi, dan Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Persentase Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Persentase Terselenggaranya Administrasi Pemerintahan	100 Persen 100 Persen 100 Persen	343.199.200	
52	Penataan Administrasi Pemerintahan	Kab. Banjar	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	4 Dokumen	66.144.045	Penataan Administrasi Pemerintahan	Kab. Banjar	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	4 Dokumen	51.425.500	
53	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kab. Banjar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	4 Dokumen	464.785.015	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kab. Banjar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	4 Dokumen	146.852.500	
54	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kab. Banjar	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	5 Dokumen	146.175.381	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kab. Banjar	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	5 Dokumen	144.921.200	
55	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kab. Banjar	Persentase Fasilitas dan Koordinasi di Bidang Kesejahteraan Masyarakat yang Sesuai Ketentuan Persentase Fasilitas dan Koordinasi di Bidang Bina Mental dan Spiritual Keagamaan Persentase Fasilitas dan Koordinasi di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Sesuai Ketentuan	100 Persen 100 Persen 100 Persen	10.179.083.500	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kab. Banjar	Persentase Fasilitas dan Koordinasi di Bidang Kesejahteraan Masyarakat yang Sesuai Ketentuan Persentase Fasilitas dan Koordinasi di Bidang Bina Mental dan Spiritual Keagamaan Persentase Fasilitas dan Koordinasi di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Sesuai Ketentuan	100 Persen 100 Persen 100 Persen	11.813.335.100	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kab. Banjar	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	8 Dokumen	6.413.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kab. Banjar	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	8 Dokumen	7.349.373.600	
57	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Kab. Banjar	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	3 Dokumen	1.266.083.500	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Kab. Banjar	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	3 Dokumen	2.429.100.000	
58	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Kab. Banjar	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	4 Dokumen	2.500.000.000	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Kab. Banjar	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	4 Dokumen	2.034.861.500	
59	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Kab. Banjar	Persentase Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum Persentase Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi Persentase Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	100 Persen 100 Persen 100 Persen	1.004.222.000	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Kab. Banjar	Persentase Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum Persentase Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi Persentase Jumlah Produk Hukum Daerah	100 Persen 100 Persen 100 Persen	693.772.400	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								yang Disusun			
60	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Kab. Banjar	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	550 Dokumen	365.917.600	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Kab. Banjar	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	700 Dokumen	250.584.800	
61	Fasilitasi Bantuan Hukum	Kab. Banjar	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	5 Kasus	413.906.800	Fasilitasi Bantuan Hukum	Kab. Banjar	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	12 Kasus	350.000.000	
62	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Kab. Banjar	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	500 Dokumen	224.397.600	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Kab. Banjar	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	650 Dokumen	93.187.600	
63	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Kab. Banjar	Persentase Kerjasama Daerah Dengan Pihak Terkait Yang Ditindaklanjuti	100 Persen	30.926.148	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Kab. Banjar	Persentase Kerjasama Daerah Dengan Pihak Terkait Yang Ditindaklanjuti	100 Persen	30.674.600	
64	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Kab. Banjar	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	1 Dokumen	30.926.148	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Kab. Banjar	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	1 Dokumen	30.674.600	
65	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Kab. Banjar	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Persentase Pengkoordinasian Dalam Penyelenggaraan Perekonomian Dan Pembangunan	60 Skor/Nilai 100 Persen	3.076.294.128	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Kab. Banjar	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Persentase Pengkoordinasian Dalam Penyelenggaraan Perekonomian Dan Pembangunan	60 Skor/Nilai 100 Persen	1.135.835.200	
66	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Kab. Banjar	Persentase Fasilitasi dan koordinasi Kebijakan lingkup urusan perekonomian	100 Persen	650.000.000	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Kab. Banjar	Persentase Fasilitasi dan koordinasi Kebijakan lingkup urusan perekonomian	100 Persen	430.117.400	
67	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kab. Banjar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	12 Dokumen	450.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kab. Banjar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	20 Dokumen	384.170.600	
68	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kab. Banjar	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Laporan	200.000.000	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kab. Banjar	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Laporan	45.946.800	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Kab. Banjar	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Pembangunan	100 Persen	646.294.128	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Kab. Banjar	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Pembangunan	100 Persen	95.549.600	
70	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Kab. Banjar	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	4 Dokumen	330.694.128	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Kab. Banjar	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	4 Dokumen	43.649.000	
71	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kab. Banjar	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	4 Laporan	93.600.000	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kab. Banjar	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	4 Laporan	36.459.600	
72	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kab. Banjar	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan	222.000.000	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kab. Banjar	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan	15.441.000	
73	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Banjar	Persentase Pemenuhan Kriteria Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa yang baik	60 Persen	1.700.000.000	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Banjar	Persentase Pemenuhan Kriteria Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa yang baik	60 Persen	568.488.400	
74	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Banjar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	5 Dokumen	300.000.000	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Banjar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	5 Dokumen	52.985.700	
75	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kab. Banjar	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	5 Dokumen	900.000.000	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kab. Banjar	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	5 Dokumen	307.697.700	
765	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Banjar	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	83 Orang	500.000.000	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Banjar	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	83 Orang	207.805.000	
77	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Kab. Banjar	Persentase fasilitasi kebijakan SDA	100 persen	80.000.000	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Kab. Banjar	Persentase fasilitasi kebijakan SDA	100 Persen	41.679.800	
78	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Kab. Banjar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM,	2 Dokumen	35.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Kab. Banjar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan	2 Dokumen	10.733.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penanaman Modal, Tenaga Kerja					Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja			
79	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Kab. Banjar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	96 Dokumen	45.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Kab. Banjar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	92 Dokumen	30.946.800	

Sumber data : 1. Rancangan Awal diambil dari Data matrik Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
2. Hasil Analisis Kebutuhan didapat dari tarikan SIPD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan
49					Sekretariat Daerah									
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4	01				SEKRETARIAT DAERAH		4	01				SEKRETARIAT DAERAH		
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
4	01	01	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4	01	01	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
4	01	01	201	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	01	01	201	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen
4	01	01	201	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	01	01	201	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan
4	01	01	201	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	01	01	201	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan
4	01	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4	01	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
4	01	01	202	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4	01	01	202	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Laporan
4	01	01	202	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4	01	01	202	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Laporan
4	01	01	205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		4	01	01	205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
4	01	01	205	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	4	01	01	205	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang
4	01	01	205	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4	01	01	205	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang
4	01	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah		4	01	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah		
4	01	01	206	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	01	01	206	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan
49					Sekretariat Daerah									
4	01	01	206	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	01	01	206	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket
4	01	01	206	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4	01	01	206	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan
4	01	01	206	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi & Konsultasi SKPD	4	01	01	206	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi & Konsultasi SKPD	Laporan
4	01	01	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4	01	01	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
4	01	01	207	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4	01	01	207	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit
4	01	01	207	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4	01	01	207	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit
4	01	01	207	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4	01	01	207	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit
4	01	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4	01	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
4	01	01	208	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	01	01	208	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan
4	01	01	208	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	01	01	208	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan
4	01	01	208	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	01	01	208	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan
4	01	01	208	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	01	01	208	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan
4	01	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4	01	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
4	01	01	209	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4	01	01	209	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	
49					Sekretariat Daerah										
4	01	01	209	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4	01	01	209	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	
4	01	01	209	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4	01	01	209	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	
4	01	01	209	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	01	01	209	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	
4	01	01	209	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	01	01	209	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	
4	01	01	209	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	01	01	209	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	
4	01	01	211		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		4	01	01	211		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			
4	01	01	211	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4	01	01	211	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/ Bulan	
4	01	01	211	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	4	01	01	211	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	
4	01	01	211	03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4	01	01	211	0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang	
4	01	01	211	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4	01	01	211	0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/ Bulan	
4	01	01	212		Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah		4	01	01	212		Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah			
4	01	01	212	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	4	01	01	212	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	
49					Sekretariat Daerah										
4	01	01	212	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	4	01	01	212	0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	
4	01	01	212	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	4	01	01	212	0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Paket	
4	01	01	213		Penataan Organisasi		4	01	01	213		Penataan Organisasi			
4	01	01	213	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	4	01	01	213	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dokumen	
4	01	01	213	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	4	01	01	213	0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Laporan	
4	01	01	213	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	4	01	01	213	0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen	
4	01	01	214		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		4	01	01	214		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan			
4	01	01	214	01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	4	01	01	214	0001	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Laporan	
4	01	01	214	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	4	01	01	214	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Laporan	
4	01	01	214	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	4	01	01	214	0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Laporan	
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			
4	01	02	201		Administrasi Tata Pemerintahan		4	01	02	201		Administrasi Tata Pemerintahan			
4	01	02	201	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	4	01	02	201	0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Dokumen	
4	01	02	201	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	4	01	02	201	0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Dokumen	
4	01	02	201	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4	01	02	201	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dokumen	
4	01	02	202		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		4	01	02	202		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan
49					Sekretariat Daerah									
4	01	02	202	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	4	01	02	202	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen
4	01	02	202	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	4	01	02	202	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Dokumen
4	01	02	202	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	4	01	02	202	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Dokumen
4	01	02	203		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		4	01	02	203		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		
4	01	02	203	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	4	01	02	203	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Dokumen
4	01	02	203	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	4	01	02	203	0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kasus
4	01	02	203	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	4	01	02	203	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Dokumen
4	01	02	204		Fasilitasi Kerja Sama Daerah		4	01	02	204		Fasilitasi Kerja Sama Daerah		
4	01	02	204	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	4	01	02	204	0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Dokumen
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		
4	01	03	201		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		4	01	03	201		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		
4	01	03	201	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	4	01	03	201	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Dokumen

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan
49					Sekretariat Daerah									
4	01	03	201	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4	01	03	201	0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan
4	01	03	202		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan		4	01	03	202		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan		
4	01	03	202	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	4	01	03	202	0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Dokumen
4	01	03	202	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	4	01	03	202	0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan
4	01	03	202	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	4	01	03	202	0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan
4	01	03	203		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		4	01	03	203		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		
4	01	03	203	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	4	01	03	203	0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen
4	01	03	203	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	4	01	03	203	0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Dokumen
4	01	03	203	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	4	01	03	203	0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Orang
4	01	03	204		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam		4	01	03	204		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam		
4	01	03	204	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	4	01	03	204	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Dokumen
4	01	03	204	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	4	01	03	204	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Dokumen

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

III.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) Kab. Banjar tahun 2024 merupakan tahun ketiga periode RPJMD tahun 2021-2026. RKPD disusun untuk mengatasi permasalahan pembangunan yang sudah berjalan dan upaya menghadapi isu yang berkembang di daerah serta memperhatikan rencana kerja pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Tema dan prioritas pembangunan tahun 2024 yaitu sebagai berikut :

A. Tema Pembangunan

Tema RKP Kabupaten Banjar tahun 2024, sebagai berikut :

**“PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN YANG TANGGUH,
MANDIRI DAN BERDAYA SAING”**

Dalam rangka mendukung dan mencapai tema pembangunan tahun 2024 tersebut dan dengan mempertimbangkan keselarasan target Indikator Makro Nasional, Indikator Makro Provinsi Kalimantan Selatan, maka target dan sasaran Pembangunan Indikator Makro Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1

Tabel Indikator Makro Tahun 2024

Indikator	Realisasi 2022	Target 2022		Target 2022		Target 2024	
		RKPD	RPJMD	RKPD	RPJMD	RPJMD	RKPD
IPM	70,72	70,18	70,18	70,64	70,64	71,09	71,63
IPG	-	92,03	92,03	92,17	92,17	92,32	92,32
Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,48	3,24	2,50%	3,42 5,02	2,80%	3,53	5,49
Pendapatan per Kapita (Rp)	-	20.882.000	20.882.000	21.177.050	21.177.000	21.628.000	21.628.000
Penduduk Miskin (%)	2,79	2,83	2,83	2,72	2,72	2,70	2,70
Pengangguran Terbuka (%)	2,72	3,13	3,13	3,09	0,312	3,06	2,66
Indeks Gini	0,300	0,313	0,313	0,312	0,312	0,311	0,298
IKLH	66,03	61,93	61,93	66,50	62,25	62,58	67,00

Sumber Data : Pengolahan Tim RKPD dan Ranwal RKPD Prov. Kalsel

B. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2024

Prioritas Pembangunan daerah adalah agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi tonggak capaian menuju sasaran 5 (lima) tahunan RPJMD. Prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, tingkat kemendesakan dan daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah.

Perumusan prioritas pembangunan disusun dengan memperhatikan :

1. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2024.

Arah Kebijakan Nasional dalam rangka mengatasi isu-isu Global, Nasional dan Lokal sebagai berikut :

ISU GLOBAL	ISU NASIONAL	ISU LOKAL
<ul style="list-style-type: none">• Pasokan Pangan dan Energi• Pembatalan Mobilitas• Investasi	<ul style="list-style-type: none">• Defisit APBN dan Investasi• Rantai Nilai• Daya Beli	<ul style="list-style-type: none">• Bencana• Pemantapan Pemulihan Ekonomi• Daya Beli• Pengangguran• Pemerataan

Untuk menjawab isu-isu tersebut, maka ditetapkan 7 Prioritas Nasional sebagai berikut :

PN 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan

Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui :

- a. Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
- b. Akselerasi peningkatan nilai tambah agrofisery industry, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

Dengan program prioritas :

- 1) Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)
- 2) Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi,
- 3) Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan
- 4) Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan
- 5) Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi
- 6) Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi
- 7) Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)
- 8) Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi

PN 2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui :

- 1) Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah;
- 2) Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang;
- 3) Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif;
- 4) Memperkuat kemampuan sumber daya manusia (SDM) dan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; serta
- 5) Meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata

PN 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM) yaitu sumber daya manusia (SDM) yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui :

- 1) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
- 2) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
- 3) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
- 4) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
- 5) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- 6) Pengentasan kemiskinan; dan
- 7) Peningkatan produktivitas dan daya saing.

PN 4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dilaksanakan secara terpadu yang bertumpu pada:

- 1) Revolusi mental dalam sistem pendidikan;
- 2) Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan; dan
- 3) Revolusi mental dalam sistem sosial. Selain itu revolusi mental juga diperkuat melalui upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan, memperkuat moderasi beragama; dan meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.

PN 5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan dengan major project Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui :

- 1) Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
- 2) Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;
- 3) Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
- 4) Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; dan
- 5) Mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.

PN 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan :

- 1) Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- 2) Peningkatan ketahanan bencana dan iklim; serta
- 3) Pembangunan rendah karbon

PN 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata Kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

- 1) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
- 2) Meningkatkan hak-hak politik dan kebebasan sipil;
- 3) Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
- 4) Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; dan
- 5) Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan Warga Negara INDONESIA (WNI) di luar negeri.

1. ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH KALIMANTAN

Secara kewilayahan disusun arah kebijakan pengembangan wilayah untuk Kalimantan sebagai berikut :

- 1) Mempercepat pertumbuhan wilayah melalui diversifikasi kegiatan ekonomi
- 2) Memantapkan peran sebagai lumbung energi nasional
- 3) Mempertahankan peran Kalimantan sebagai paru-paru dunia
- 4) Mendorong pemerataan pembangunan, terutama di Kalimantan Bagian Utara

Strategi pengembangan wilayah Kalimantan

Strategi pengembangan wilayah yang akan dilaksanakan dalam rangka mengembangkan wilayah di Kalimantan melalui strategi pertumbuhan dan strategi pemerataan.

a. Strategi Pertumbuhan

- 1) Membangun IKN dan infrastruktur pendukungnya.
- 2) Meningkatkan investasi dan optimalisasi pengelolaan kawasan-kawasan strategis.
- 3) Mengembangkan komoditas unggulan wilayah, yaitu sawit, karet, dan perikanan dengan berorientasi pada peningkatan produktivitas dan penguatan rantai pasok.
- 4) Mengembangkan kawasan perkotaan sebagai pusat pelayanan wilayah dan pendukung kawasan strategis di sekitarnya.
- 5) Mengembangkan sentra produksi pangan (food estate) dengan didukung korporasi petani.
- 6) Meningkatkan pelayanan perizinan investasi dan memperkuat forum kerja sama, pengembangan sumber pembiayaan alternatif serta investasi di daerah, serta penataan regulasi daerah dan harmonisasi regulasi pusatdaerah regional Wilayah Kalimantan.
- 7) Meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah melalui pemberian sertifikat hak atas tanah.

b. Strategi pemerataan

- 1) Memperkuat konektivitas wilayah dengan mengintegrasikan infrastruktur multimoda transportasi dengan jaringan Trans Kalimantan.
- 2) Mengembangkan kota-kota sedang sebagai pusat pelayanan dan basis pengembangan ekonomi lokal.
- 3) Mengembangkan ekonomi kawasan perbatasan khususnya PKSN Paloh Aruk, PKSN Nunukan, dan PKSN Long Nawang untuk memperkuat kedaulatan nasional dan

memfasilitasi perdagangan lintas negara.

- 4) Mempercepat penuntasan SPM, terutama di wilayah 3T (Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) khususnya pada bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat dan sosial
- 5) Peningkatan kualitas tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah dan desa melalui Penyelarasan kualitas dan kuantitas ASN dengan sektor unggulan kewilayahan Kalimantan serta penguatan fungsi dan peran GWPP guna mendorong peningkatan daya saing daerah serta penyelenggaraan pelayanan publik.
- 6) Meningkatkan aksesibilitas masyarakat khususnya di daerah 3T terhadap pelayanan
- 7) Pendidikan, kesehatan, dan balai-balai latihan kerja.
- 8) Meningkatkan upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dan ketangguhan terhadap ancaman bencana, serta mempertahankan pelestarian

2. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Arah Kebijakan Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka mengatasi Isu Strategis sebagai berikut :

- a. Lingkungan Hidup
Masih terjadinya kerusakan lingkungan (pencemaran air, lubang tambang, dan deforestasi) dan belum optimalnya mitigasi bencana (banjir dan kebakaran hutan lahan.
- b. Infrastruktur
Belum mantapnya infrastruktur dasar dan infrastruktur pendukung ekonomi (termasuk energi dan konektivitas)
- c. Sumber Daya Manusia
Belum optimalnya kualitas sumber daya manusia
- d. Ekonomi
Belum terdiversifikasinya sektor ekonomi di Kalimantan Selatan dalam mendukung transformasi struktur ekonomi daerah (pertanian, pariwisata, hilirisasi komoditas unggulan, dan pelaku UMKM).

- e. Tata Kelola Pemerintahan
Belum optimalnya tata kelola pemerintahan daerah dan pelayanan ke masyarakat berbasis digital
- f. Gerbang Ibu Kota Negara Baru dan Food Estate
Kalimantan Selatan memiliki peluang besar menjadi gerbang food estate di kalteng dan ibu kota negara di Kaltim (jalur logistik dan konektivitas).

Tema Pembangunan yang diusung pada RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 adalah : **“PENINGKATAN KUALITAS DAYA SAING DAERAH UNTUK MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI INKLUSIF”**

Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024 diarahkan untuk peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, kesetaraan, keberlanjutan dan mengutamakan aspek lokal dengan target pembangunan ekonomi yang tumbuh secara inklusif. Pertumbuhan ekonomi inklusif tidak lepas dari pencapaian kualitas daya saing daerah melalui akselerasi pembangunan pada berbagai bidang (sosial, ekonomi, infrastruktur dan lingkungan hidup) baik dalam hal kuantitas dan kualitas untuk mewujudkan “Kalsel MAJU”.

Tema tersebut di jabarkan melalui beberapa prioritas sebagai berikut :

1. Penguatan sektor industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata, dengan sub prioritas, yakni :
 - a. Peningkatan nilai tambah, daya saing hasil industri, UMKM, pertanian dan kelautan berkelanjutan
 - b. Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja
 - c. Pengembangan pariwisata dan Ekonomi Kreatif berbasis Geopark
 - d. Peningkatan jumlah dan kelas wirausaha baru berbasis digital
 - e. Peningkatan realisasi investasi yang berdampak ke daerah

- f. Peningkatan Produktivitas Pertanian sebagai Lumbung Pangan IKN
2. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang unggul dan berdaya saing, dengan sub prioritas :
 - a. Peningkatan Angka Rata-Rata Lama Sekolah
 - b. Peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda
 - c. Perencanaan Penganggaran Yang Responsif Gender Dan Inklusif
 - d. Penurunan Penyakit Melalui GERMAS
 - e. Pengendalian Prevalensi Stunting
 - f. Penurunan Angka Pernikahan Anak
 - g. Peningkatan Prestasi Olahraga
 - h. Pengembangan Budaya Daerah
 3. Memperkuat infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan dasar dan pengembangan perekonomian daerah, dengan sub prioritas :
 - a. Pemenuhan Pencapaian Infrastruktur Dasar
 - b. Pembangunan Sarana dan Prasarana menunjang Konektivitas antar Wilayah
 - c. Pengembangan Kawasan Prioritas dan pedesaan yang terintegrasi dengan infrastruktur sebagai pendukung pintu Gerbang IKN
 4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang fokus pada pelayanan publik, dengan sub prioritas :
 - a. Penguatan Reformasi Birokrasi
 - b. Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (PDN)
 - c. Pelaksanaan Pilkada Serentak
 - d. Peningkatan Keamanan Dan Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat
 - e. Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

(SPBE) dalam rangka meningkatkan Pelayanan Publik

- f. Pengembangan Satu Data Kalsel
5. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup untuk mendukung ketahanan bencana, dengan sub prioritas :
- a. Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup
 - b. Pelaksanaan Mitigasi dan Pemulihan Pasca Bencana

3. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BANJAR TAHUN 2024

Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Banjar disusun dengan memperhatikan Arah Kebijakan Nasional, Arah Kebijakan Provinsi Kalimantan Selatan, dan isu-isu strategis ditingkat lokal, serta dalam upaya memecahkan dan mengatasi berbagai permasalahan dan isu strategis di daerah sebagai berikut :

1) Isu Strategis Daerah

Isu Strategis Pembangunan di Kabupaten Banjar berdasarkan pada permasalahan yang dihadapi, sebagai berikut :

- a. Pembangunan ekonomi yang inklusif yang mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat yang belum tercapai secara optimal.
 - Ekonomi sektor industri pengolahan yang fluktuatif dan belum tumbuh dan berkembang optimal.
 - Pertumbuhan investasi yang belum optimal.
 - Sektor pariwisata belum tumbuh dan berkembang secara optimal, khususnya pada peningkatan jumlah kunjungan wisata dan destinasi wisata yang dikembangkan.
 - Produksi dan produktivitas sektor pertanian (tanaman pangan, perkebunan, peternakan, hortikultura, dan perikanan) belum dikembangkan dengan optimal berdasarkan pada potensi yang tersedia.
 - Penurunan jumlah penduduk miskin, khususnya

penghapusan kemiskinan ekstrem memerlukan kolaborasi dan sinergitas.

- Kondisi perekonomian global yang memiliki kecenderungan pada terjadinya krisis ekonomi global.
 - Krisis pangan dan energi yang mengancam seiring dengan terjadinya bencana dan kondisi ekonomi global.
 - Kondisi perekonomian yang kurang stabil berdampak pada kecenderungan terjadinya Inflasi yang tinggi.
 - Clusterisasi produk unggulan daerah belum berjalan dengan baik.
- b. Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang masih perlu didorong dengan optimal.
- Cakupan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat yang masih rendah.
 - Peningkatan kualitas pendidikan, khususnya dalam upaya peningkatan angka RLS masih belum optimal.
 - Kecenderungan terjadinya risiko Kematian Ibu (AKI) dan Kematian Bayi (AKB) yang masih cukup tinggi.
 - Kecenderungan terjadinya kondisi balita gizi kurang dan gizi buruk serta prevalensi stunting yang masih cukup tinggi
 - Upaya pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta perlindungan anak masih belum terselenggara secara optimal.
- c. Pembangunan infrastruktur ekonomi yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur layanan dasar yang memenuhi kebutuhan pelayanan dasar dan pengelolaan lingkungan belum terpenuhi secara optimal.
- Masih terdapat backlog terhadap pemenuhan kebutuhan layanan dasar, seperti rumah layak huni, air bersih, air limbah, dan lainnya.

- Kemantapan jalan, baik jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, maupun jalan poros desa belum tertangani secara optimal.
 - Pengelolaan sektor persampahan yang belum dilakukan secara komprehensif dengan mengoptimalkan sinergitas dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
 - Pengelolaan kebencanaan daerah yang belum dilakukan secara holistik dengan mengoptimalkan kolaborasi dan sinergitas antar pemangku 22 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN kepentingan, baik itu antar lembaga pemerintah, maupun antara pemerintah dengan masyarakat/komunitas.
 - Upaya pengendalian pencemaran lingkungan hidup belum dilakukan secara optimal, baik dari aspek kualitas air, kualitas udara, maupun tutupan lahan.
 - Upaya pengendalian lingkungan akibat perubahan iklim belum optimal dilaksanakan.
- d. Penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, baik dan bersih belum dilaksanakan secara optimal.
- Penyelenggaraan pelayanan publik yang melayani, baik secara digital maupun non digital belum optimal dilaksanakan
 - Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik secara intensifikasi maupun diversifikasi belum sepenuhnya dilaksanakan.
 - Penyelenggaraan informasi dan statistik melalui manajemen satu data belum dilaksanakan sesuai dengan standar yang dtentukan.
 - Penyelenggaraan pemerintahan, berbasis kinerja dan manajemen resiko yang belum terinternalisasi secara optimal.

- Peningkatan koordinasi di tingkat kecamatan dan di tingkat desa masih perlu dioptimalkan dalam upaya mendukung percepatan pencapaian target indikator, khususnya pada wilayah kecamatan dan desa yang menjadi lokus kegiatan.
- e. Penguatan karakter agamis, dan kehidupan masyarakat yang demokratis masih perlu didorong dan ditingkatkan.
- Penguatan karakter religius masih perlu ditingkatkan melalui penyelenggaraan event keagamaan dan event budaya.
 - Kesadaran demokratis masyarakat yang masih rendah, khususnya ditinjau dari tingkat partisipasi masyarakat pada Pemilihan Legislatif (Pileg), Pemilihan Presiden (Pilpres), maupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
 - Kecenderungan meningkatnya pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang ditinjau dari angka kriminalitas yang cukup tinggi.

2. Prioritas Pembangunan Daerah

Dengan memperhatikan dan mempertimbangkan beberapa isu strategis diatas, Pemerintah Kabupaten Banjar menetapkan 5 Prioritas Pembangunan Daerah pada Tahun 2024, yakni sebagai berikut :

PRIORITAS 1

Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang mampu mendorong pada pertumbuhan ekonomi makro dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan sub prioritas :

1. Peningkatan investasi di Kabupaten Banjar melalui realisasi investasi pada sektor-sektor unggulan.
2. Pengembangan pariwisata yang mendorong peningkatan jumlah kunjungan wisata, baik lokal, regional maupun internasional.

3. Mengembangkan ekonomi kreatif yang mampu mendorong peningkatan UMKM berbasis sumber daya lokal dan digital.
4. Peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian dan perikanan yang mampu mendorong ketahanan pangan daerah dan pengembangan industri pengolahan berbasis pertanian dan perikanan.
5. Penurunan kemiskinan ekstrem melalui inovasi program komplementer, penguatan kapasitas kelembagaan, koordinasi antar sektor terkait, dan penguatan kemitraan pemerintah daerah dengan sektor bukan pemerintah.
6. Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (PDN) dalam upaya penguatan pasar lokal.
7. Peningkatan upaya penciptaan lapangan pekerjaan mandiri berbasis potensi dan sumber daya lokal.
8. Penajaman strategi ekspor dan impor dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan daerah.

PRIORITAS 2

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, dengan sub prioritas :

1. Peningkatan Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS), khususnya pada angka partisipasi terhadap Sekolah Menengah Pertama.
2. Peningkatan layanan kesehatan bagi ibu dan bayi, khususnya pada layanan preventif dan edukatif bagi, remaja putri, ibu hamil dan menyusui.
3. Peningkatam upaya pencegahan pernikahan anak melalui edukasi dan advokasi bagi orangtua dan anak.
4. Peningkatan upaya pencegahan dan penurunan prevalensi stunting melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, kader dan intervensi gizi spesifik dan sensitif.
5. Peningkatan cakupan kesehatan semesta (UHC) melalui strategi yang kolaboratif dan sinergi antar pemangku kepentingan.

6. Mendorong penyediaan pangan, khususnya penyediaan pangan bahan pokok dan penting dengan harga terjangkau.
7. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui gerakan memasyarakatkan budaya hidup sehat serta meninggalkan kebiasaan dan perilaku masyarakat yang kurang sehat sebagai upaya pencegahan terhadap penyakit menular dan penyakit tidak menular.

PRIORITAS 3

Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi, pemenuhan pelayanan dasar dan pengelolaan lingkungan hidup, dengan sub prioritas :

1. Peningkatan layanan infrastruktur dasar yang mendorong pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan hidup.
2. Peningkatan layanan infrastruktur, sarana dan prasarana wilayah yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan konektivitas antar wilayah.
3. Peningkatan pengendalian pencemaran, kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
4. Peningkatan pembangunan berbasis kawasan strategis (prioritas) dan perdesaan yang mendorong pemerataan ekonomi wilayah.
5. Peningkatan pengelolaan kebencanaan berbasis mitigasi dan rehabilitasi yang sinergi dan kolaboratif antar pemangku kepentingan.

PRIORITAS 4

Meningkatkan tata kelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi, dengan sub prioritas :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
2. Peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) melalui

strategi intensifikasi dan ekstensifikasi sektor-sektor pendapatan.

3. Pengembangan Satu Data untuk pembangunan dan informasi statistik.
4. Peningkatan Kompetensi ASN sebagai upaya terwujudnya ASN yang profesional dan BERAKHLAK.
5. Penerapan Sistem remunerasi yang lebih adil dan kompetitif.
6. Penerapan sistem pengendalian internal pemerintah sebagai upaya peningkatan akuntabilitas kinerja dan pencegahan korupsi.

PRIORITAS 5

Penguatan Karakter Agamis Dan Kehidupan Masyarakat Yang Demokratis dengan sub prioritas :

1. Peningkatan penyelenggaraan even keagamaan dan kebudayaan dalam upaya mendorong karakter religius dan agamis.
2. Pembentukan pemuda berkarakter
3. Peningkatan partisipasi pemuda dan santri dalam pembangunan daerah dan olahraga.
4. Peningkatan partisipasi masyarakat pada Pemilu Legislatif, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah
5. Penurunan Kasus Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum

III.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah, maka Visi, Misi dan Program Strategis yang merupakan komitmen yang harus diimplementasikan dalam dokumen perencanaan daerah (RPJMD) agar dapat diwujudkan secara konsisten selama 5 (lima) tahun.

Selanjutnya, Visi dan Misi tersebut dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran dengan memperhatikan Permasalahan Pembangunan Daerah serta Isu-isu Strategis Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar. Upaya mengelaborasi antara gagasan Bupati dan Wakil Bupati terpilih dengan kondisi empiris permasalahan pembangunan dan Isu Strategis Daerah tersebut sangat penting untuk memastikan bahwa strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Banjar 2021-2026 ini merupakan kunci untuk mewujudkan kesejahteraan umum, pelayanan publik dan daya saing di Kabupaten Banjar. Berikut akan dibahas Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dari RPJMD Kabupaten Banjar 2021-2026 ini.

Tujuan dan Sasaran RPJMD merupakan hasil dari perumusan capaian strategis Kabupaten Banjar yang merepresentasikan atau menjadi tolok ukur keberhasilan atau kegagalan pemerintah. Sehingga, syarat utama penentuan tujuan dan sasaran adalah dapat diukur yang direpresentasikan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) atau indikator tujuan sebagai indikator keberhasilan kepala daerah dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) atau indikator kinerja sasaran RPJMD. Berikut merupakan penjabaran Tujuan dan Sasaran pembangunan Perubahan RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026.

Tujuan yang ingin dicapai Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar untuk mendukung visi dan misi Kabupaten Banjar adalah “Terselenggaranya Reformasi dalam perencanaan, penganggaran dan akuntabilitas kinerja, dan Terselenggaranya reformasi dalam pelayanan publik”. Sesuai dengan Misi ke 4 dan sasaran ke 3 pada dokumen RPJMD Kabupaten Banjar.

Sedangkan untuk sasaran pada Renja SKPD diambil dari pohon kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar yaitu Nilai SAKIP dan Indeks Kepuasan Masyarakat.

III.3. Program dan Kegiatan

III.3.1. Rincian Program dan Kegiatan

Program Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar adalah Program Strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD Kabupaten Banjar di tahun 2023.

Dasar pertimbangan penetapan program dan kegiatan prioritas ini Dokumen RPJMD Kabupaten Banjar tahun 2024. Jumlah Program dan Kegiatan serta Sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar di tahun 2024 berjumlah 3 program 19 kegiatan dan 57 sub kegiatan. Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar untuk tahun 2024 yang merupakan sasaran pada RPJMD Kabupaten Banjar tahun 2021-2026 dengan rincian adalah sebagai berikut :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Kegiatan :
 - a) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Sub Kegiatan :
 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Sub Kegiatan :
 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - c) Administrasi Umum Perangkat Daerah, Sub Kegiatan :
 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 3. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - d) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Sub Kegiatan :

1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 3. Pengadaan Mebel
- e) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Sub Kegiatan :
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Sub Kegiatan :
1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 6. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- g) Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Sub Kegiatan :
1. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 2. Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 4. Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- h) Fasilitas Kerumah Tanggaan Sekretariat Daerah, Sub Kegiatan :
1. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
 2. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah

3. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah
- i) Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Sub Kegiatan :
 1. Fasilitasi Keprotokolan
 2. Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
 3. Pendokumentasian Tugas Pimpinan
- j). Penataan Organisasi, Sub Kegiatan :
 1. Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
 2. Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
 3. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
- 2) Program Perekonomian dan Pembangunan Sub Kegiatan :
 - a). Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian, Sub Kegiatan :
 1. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
 2. Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
 - b). Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam, Sub Kegiatan :
 1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
 2. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air
 - c). Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Sub Kegiatan :
 1. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
 2. Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik
 3. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
 - d). Pelaksanaan Administrasi Pembangunan, Sub Kegiatan :
 1. Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan
 2. Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
 3. Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan

III.3.2. Faktor-Faktor yang Menjadi Pertimbangan dalam Penetapan Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam penetapan program dan kegiatan, adalah sebagai berikut :

- a) Pencapaian RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2023;
- b) Pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar;

- c) Pencapaian indikator kinerja utama Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar;
- d) Pencapaian fasilitasi dan administrasi penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah.

III.3.3. Garis Besar Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Uraian garis besar rekapitulasi program dan kegiatan pada Renja Sekretariat Daerah Tahun 2024, antara lain meliputi :

- 1) Jumlah program yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2024 secara keseluruhan adalah 3 (Tiga) program dengan total kegiatan sebanyak 19 kegiatan; serta sub kegiatan sebanyak 57 sub kegiatan.
- 2) Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan adalah diluar wilayah dan dalam wilayah Kabupaten Banjar mencakup Kecamatan dan Kelurahan dan Sekretariat Daerah itu sendiri;
- 3) Total kebutuhan dana/ pagu indikatif untuk pelaksanaan 3 Program dan 19 Kegiatan serta 57 Sub Kegiatan Strategis ini adalah sebesar **Rp. 61.786.107.016,00.**

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel IV.1 di bawah ini. Tabel di bawah berisi Program Pembangunan Daerah (Program Strategis Daerah) dan Program Perangkat Daerah untuk mewujudkan target tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat Daerah dan RPJMD Kabupaten Banjar.

Jumlah seluruh program dan kegiatan serta sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah di tahun 2024 adalah sebanyak 3 program 19 kegiatan 57 sub kegiatan.

Total kebutuhan dana untuk pelaksanaan semua program dan kegiatan serta sub kegiatan untuk tahun 2024 adalah sebesar Rp. 61.786.107.016,00. Nilai total untuk tiap sumber pendanaan adalah seperti yang ditunjukkan pada Tabel IV.1.

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
		Indikator Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP Setda Persentase Lapoproan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Akuntabel Persentase Perencanaan dan Penganggaran yang Efektif dan Efisien Persentase Bagian yang Berkinerja Baik	Kab.Banjar, Martapura, Keraton	90 Nilai	3 Laporan	82 Nilai 100 Persen 100 Persen 100 Persen	14.999.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	110.623.000
4	0 1	0 1	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
		Indikator Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Setda Persentase Lapoproan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Akuntabel Persentase Perencanaan dan Penganggaran yang Efektif dan Efisien Persentase Bagian yang Berkinerja Baik	Kab.Banjar, Martapura, Keraton	90 Nilai	28 Laporan	82 Nilai 100 Persen 100 Persen 100 Persen	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28 Laporan	38.300.000
4	0 1	0 1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				16.919.381.406				19.813.625.000
4	0 1	0 1	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
		Indikator Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan yang Tertib Administrasi	Kab.Banjar, Martapura, Keraton	90 Nilai	117 Orang/bulan	100 Persen	16.491.317.406	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	117 Orang/bulan	19.679.625.000
4	0 1	0 1	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target				
		Indikator Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan yang Tertib Administrasi	Kab.Banjar, Martapura, Keraton	90 Nilai	12 Dokumen	100 Persen	428.064.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	134.000.000			
4	0 1	0 1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				170.000.200				587.688.000			
4	0 1	0 1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan											
					Indikator Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terlayani Persentase Jumlah Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab.Banjar, Martapura, Keraton	90 Nilai	200 Orang	100 Persen 100 Persen	120.000.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	200 Orang	137.688.000
4	0 1	0 1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan											
					Indikator Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terlayani Persentase Jumlah Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab.Banjar, Martapura, Keraton	90 Nilai	80 Orang	100 Persen 100 Persen	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	80 Orang	450.000.000
4	0 1	0 1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				3.392.237.000				5.706.317.910			
4	0 1	0 1	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
		Indikator Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlayani	Kab.Banjar, Martapura, Keraton	90 Nilai	6 Paket	100 Persen	45.174.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	49.694.482
4	0 1	0 1	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Indikator Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlayani	Kab.Banjar, Martapura, Keraton	90 Nilai	8 Paket	100 Persen	848.473.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	625.877.328
4	0 1	0 1	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
		Indikator Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlayani	Kab.Banjar, Martapura, Keraton	90 Nilai	4 Laporan	100 Persen	27.940.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	30.746.100
4	0 1	0 1	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
		Indikator Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlayani	Kab.Banjar, Martapura, Keraton	90 Nilai	12 Laporan	100 Persen	2.470.650.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	5.000.000.000
4	0 1	0 1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				8.461.550.000				6.171.548.195
4	0 1	0 1	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
		Indikator Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang Sesuai Ketentuan	Kab.Banjar, Martapura, Keraton	90 Nilai	9 Unit	100 Persen	4.349.380.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	9 Unit	2.126.312.430
4	0 1	0 1	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
		Indikator Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang Sesuai Ketentuan	Kab.Banjar, Martapura, Keraton	90 Nilai	16 Unit	100 Persen	3.373.360.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	16 Unit	3.750.000.000
4	0 1	0 1	2.07	05	Pengadaan Mebel								
		Indikator Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang Sesuai Ketentuan	Kab.Banjar, Martapura, Keraton	90 Nilai	6 Unit	100 Persen	738.810.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit	295.235.765
4	0 1	0 1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			6.360.371.000					7.082.766.004
4	0 1	0 1	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
		Indikator Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Sesuai Ketentuan	Kab.Banjar, Martapura, Keraton	90 Nilai	2 Laporan	100 Persen	36.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	125.000.000
4	0 1	0 1	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
		Indikator Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Sesuai Ketentuan	Kab.Banjar, Martapura, Keraton	90 Nilai	12 Laporan	100 Persen	1.576.288.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.734.724.244
4	0 1	0 1	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Indikator Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Sesuai Ketentuan	Kab.Banjar, Martapura, Keraton	90 Nilai	4 Laporan	100 Persen	275.833.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	303.434.725
4	0 1	0 1	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
		Indikator Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Sesuai Ketentuan	Kab.Banjar, Martapura, Keraton	90 Nilai	13 Laporan	100 Persen	4.472.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	4.919.607.035
4	0 1	0 1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				4.625.754.100				4.582.881.897
4	0 1	0 1	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target		
		Indikator Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Sesuai Ketentuan	Kab.Banjar, Martapura, Keraton	90 Nilai	25 Unit	100 Persen	784.330.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	25 Unit	1.027.798.200	
4	0 1	0 1	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
		Indikator Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Sesuai Ketentuan	Kab.Banjar, Martapura, Keraton	90 Nilai	121 Unit	100 Persen	1.240.240.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	121 Unit	2.344.097.305	
4	0 1	0 1	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
		Indikator Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Sesuai Ketentuan	Kab.Banjar, Martapura, Keraton	90 Nilai	16 Unit	100 Persen	65.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit	73.205.000	
4	0 1	0 1	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
		Indikator Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Sesuai Ketentuan	Kab.Banjar, Martapura, Keraton	90 Nilai	6 Unit	100 Persen	1.660.526.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	153.730.500	
4	0 1	0 1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
		Indikator Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Sesuai Ketentuan	Kab.Banjar, Martapura, Keraton	90 Nilai	6 Unit	100 Persen	453.980.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	519.755.500
4	0 1	0 1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
		Indikator Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Sesuai Ketentuan	Kab.Banjar, Martapura, Keraton	90 Nilai	250 Unit	100 Persen	421.678.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	250 Unit	464.295.392
4	0 1	0 1	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				1.155.029.360				1.117.491.070
4	0 1	0 1	2.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah								

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
		Indikator Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pengadaan Pakaian Dinas KDH/WKDH yang Sesuai Ketentuan Persentase Penyediaan dan Penatausahaan Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Persentase Pelayanan Kesehatan KDH/WKDH yang Sesuai Ketentuan Persentase Penyediaan dan Penatausahaan Dana Penunjang Operasional KDH/WKDH Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan	Kab.Banjar, Martapura, Keraton	90 Nilai	24 Orang/ Bulan	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	288.429.360	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	24 Orang/ Bulan	250.000.000
4	0 1	0 1	2.11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah								
		Indikator Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Persentase Pengadaan Pakaian Dinas KDH/WKDH yang Sesuai Ketentuan Persentase Penyediaan dan Penatausahaan Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Persentase Pelayanan Kesehatan KDH/WKDH yang Sesuai Ketentuan Persentase Penyediaan dan Penatausahaan Dana Penunjang Operasional KDH/WKDH Tepat	Kab.Banjar, Martapura, Keraton	90 Nilai	9 Paket	100 Persen 100 Persen 100 Persen	135.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	9 Paket	135.722.070

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target				
				Waktu dan Sesuai Ketentuan												
4	0 1	0 1	2.11	03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah											
					Indikator Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pengadaan Pakaian Dinas KDH/WKDH yang Sesuai Ketentuan Persentase Penyediaan dan Penatausahaan Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Persentase Pelayanan Kesehatan KDH/WKDH yang Sesuai Ketentuan Persentase Penyediaan dan Penatausahaan Dana Penunjang Operasional KDH/WKDH Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan	Kab.Banjarnegara, Martapura, Keraton	90 Nilai	6 Orang	100 Persen 100 Persen 100 Persen	131.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	6 Orang	131.769.000
4	0 1	0 1	2.11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah											

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
		Indikator Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pengadaan Pakaian Dinas KDH/WKDH yang Sesuai Ketentuan Persentase Penyediaan dan Penatausahaan Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Persentase Pelayanan Kesehatan KDH/WKDH yang Sesuai Ketentuan Persentase Penyediaan dan Penatausahaan Dana Penunjang Operasional KDH/WKDH Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan	Kab.Banjar, Martapura, Keraton	90 Nilai	24 Orang/Bulan	100 Persen 100 Persen 100 Persen	600.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	24 Orang/Bulan	600.000.000
4	0 1	0 1	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah				3.799.296.950				4.179.542.258
4	0 1	0 1	2.12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah								
		Indikator Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Persentase Pelayanan Kerumahtanggaan KDH yang Sesuai Ketentuan Persentase Pelayanan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang Sesuai Ketentuan Persentase Pelayanan Kerumahtanggaan WKDH yang Sesuai Ketentuan	Kab.Banjar, Martapura, Keraton	90 Nilai	7 Paket	100 Persen 100 Persen 100 Persen	805.245.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	7 Paket	885.788.113
4	0 1	0 1	2.12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah								

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
		Indikator Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Persentase Pelayanan Kerumahtanggaan KDH yang Sesuai Ketentuan Persentase Pelayanan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang Sesuai Ketentuan Persentase Pelayanan Kerumahtanggaan WKDH yang Sesuai Ketentuan	Kab.Banjar, Martapura, Keraton	90 Nilai	6 Paket	100 Persen 100 Persen 100 Persen	480.713.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	6 Paket	529.046.093
4	0 1	0 1	2.12	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah								
		Indikator Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Persentase Pelayanan Kerumahtanggaan KDH yang Sesuai Ketentuan Persentase Pelayanan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang Sesuai Ketentuan Persentase Pelayanan Kerumahtanggaan WKDH yang Sesuai Ketentuan	Kab.Banjar, Martapura, Keraton	90 Nilai	17 Paket	100 Persen 100 Persen 100 Persen	2.513.338.250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	17 Paket	2.764.708.052
4	0 1	0 1	2.13		Penataan Organisasi				437.463.400				1.628.317.050
4	0 1	0 1	2.13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan								

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
		Indikator Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Perangkat Daerah Pengelolaan RB Bernilai Baik Tingkat Efisiensi Unit dan Prestasi Kerja Unit Kabupaten Banjar Bernilai Baik Persentase Perangkat Daerah yang Pelayanan Publik Bernilai Baik Persentase Perangkat Daerah SAKIP Bernilai Baik Persentase Pengelolaan Tatalaksana	Kab.Banjar, Martapura, Semua Kel/Desa	90 Nilai	2 Dokumen	100 Persen 1.3 Skor/Nilai 100 Persen 100 Persen 100 Persen	156.760.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2 Dokumen	185.548.055
4	0 1	0 1	2.13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana								
		Indikator Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Persentase Perangkat Daerah Pengelolaan RB Bernilai Baik Tingkat Efisiensi Unit dan Prestasi Kerja Unit Kabupaten Banjar Bernilai Baik Persentase Perangkat Daerah yang Pelayanan Publik Bernilai Baik Persentase Perangkat Daerah SAKIP Bernilai Baik Persentase Pengelolaan Tatalaksana	Kab.Banjar, Martapura, Keraton	90 Nilai	5 Laporan	100 Persen 1.3 Skor/Nilai 100 Persen 100 Persen 100 Persen	181.870.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	5 Laporan	251.079.307
4	0 1	0 1	2.13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi								

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target		
		Indikator Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Persentase Perangkat Daerah Pengelolaan RB Bernilai Baik Tingkat Efisiensi Unit dan Prestasi Kerja Unit Kabupaten Banjar Bernilai Baik Persentase Perangkat Daerah yang Pelayanan Publik Bernilai Baik Persentase Perangkat Daerah SAKIP Bernilai Baik Persentase Pengelolaan Tatalaksana	Kab.Banjar, Martapura, Keraton	90 Nilai	7 Dokumen	100 Persen 1.3 Skor/Nilai 100 Persen 100 Persen 100 Persen	98.833.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	7 Dokumen	1.191.689.688	
4	0 1 1	0 1 1	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan					2.378.207.600				3.418.790.495
4	0 1 1	0 1 1	2.14	01	Fasilitasi Keprotokolan									
		Indikator Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Persentase Fasilitasi Keprotokolan Kepada Pimpinan Persentase Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Persentase Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kab.Banjar, Martapura, Keraton	90 Nilai	12 Laporan	100 Persen 100 Persen 100 Persen	1.997.177.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan	2.320.766.206	
4	0 1 1	0 1 1	2.14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan									
		Indikator Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Persentase Fasilitasi Keprotokolan Kepada Pimpinan Persentase Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Persentase Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kab.Banjar, Martapura, Keraton	90 Nilai	12 Laporan	100 Persen 100 Persen 100 Persen	251.703.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	606.874.641	
4	0 1 1	0 1 1	2.14	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan									

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target			
		Indikator Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Persentase Fasilitasi Keprotokolan Kepada Pimpinan Persentase Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Persentase Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kab.Banjar, Martapura, Keraton	90 Nilai	12 Laporan	100 Persen 100 Persen 100 Persen	129.326.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 Laporan	491.149.648		
4	0 1 2			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				12.880.981.300					13.292.005.499		
4	0 1 2	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan				343.199.200					751.179.886		
4	0 1 2	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan											
				Nilai LPPD	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Persentase Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Persentase Fasilitasi, Koordinasi, dan Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Persentase Terselenggaranya Administrasi Pemerintahan	Kab.Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.1500 Nilai	4 Dokumen	100 Persen 100 Persen 100 Persen	51.425.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	4 Dokumen	72.738.450
4	0 1 2	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan											
				Nilai LPPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Persentase Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Persentase Fasilitasi, Koordinasi, dan Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Persentase Terselenggaranya Administrasi Pemerintahan	Kab.Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.1500 Nilai	4 Dokumen	100 Persen 100 Persen 100 Persen	146.852.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	4 Dokumen	517.648.517

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target		
4 0 1 2	2.01 03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah												
		Nilai LPPD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Persentase Fasilitasi, Koordinasi, dan Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Persentase Terselenggaranya Administrasi Pemerintahan	Kab.Banjar, Martapura, Keraton	3.1500 Nilai	5 Dokumen	100 Persen 100 Persen 100 Persen	144.921.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	5 Dokumen	160.792.919	
4 1 2	2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat												
4 0 1 2	2.02 01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual												
		Persentase Pengkoordinasian Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi di Bidang Bina Mental dan Spiritual Keagamaan yang Sesuai Ketentuan Persentase Fasilitasi dan Koordinasi di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Sesuai Ketentuan Persentase Fasilitasi dan Koordinasi di Bidang Kesejahteraan Masyarakat yang Sesuai Ketentuan	Kab.Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	8 Dokumen	100 Persen 100 Persen 100 Persen	7.349.373.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	8 Dokumen	7.054.300.000	
4 1 2	2.02 02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial												

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
		Persentase Pengkoordinasian Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi di Bidang Bina Mental dan Spiritual Keagamaan yang Sesuai Ketentuan Persentase Fasilitasi dan Koordinasi di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Sesuai Ketentuan Persentase Fasilitasi dan Koordinasi di Bidang Kesejahteraan Masyarakat yang Sesuai Ketentuan	Kab.Banjar, Martapura, Keraton	100 Persen	3 Dokumen	100 Persen 100 Persen 100 Persen	2.429.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	3 Dokumen	1.392.691.850
4	0 1 2	2.02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat									

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
		Persentase Pengkoordinasian Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi di Bidang Bina Mental dan Spiritual Keagamaan yang Sesuai Ketentuan Persentase Fasilitasi dan Koordinasi di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Sesuai Ketentuan Persentase Fasilitasi dan Koordinasi di Bidang Kesejahteraan Masyarakat yang Sesuai Ketentuan	Kab.Banjar, Martapura, Keraton	100 Persen	4 Dokumen	100 Persen 100 Persen 100 Persen	2.034.861.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	4 Dokumen	2.800.000.000
4	0 1 2	0 2	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum			693.772.400					1.259.815.000
4	0 1 2	0 2	2.03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah								
		Persentase Pengkoordinasian Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Persentase Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun Persentase Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum Persentase Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Kab.Banjar, Martapura, Jawa Laut	100 Persen	700 Dokumen	100 Persen 100 Persen 100 Persen	250.584.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	700 Dokumen	457.397.000
4	0 1 2	0 2	2.03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum								

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target		
		Persentase Pengkoordinasian Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun Persentase Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum Persentase Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Kab.Banjar, Martapura, Keraton	100 Persen	12 Kasus	100 Persen 100 Persen 100 Persen	350.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	12 Kasus	513.906.800	
4	0 1 2	0 2	2.03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum									
		Persentase Pengkoordinasian Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Persentase Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun Persentase Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum Persentase Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Kab.Banjar, Martapura, Keraton	100 Persen	650 Dokumen	100 Persen 100 Persen 100 Persen	93.187.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	650 Dokumen	288.511.200	
4	0 1 2	0 2	2.04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah					30.674.600				34.018.763
4	0 1 2	0 2	2.04	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri									

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
		Persentase Pengkoordinasian Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Persentase Kerjasama Daerah Dengan Pihak Terkait yang Ditindaklanjuti	Kab.Banjar, Martapura, Keraton	100 Persen	1 Dokumen	100 Persen	30.674.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	1 Dokumen	34.018.763
4	0 1 3								1.135.835.200				3.460.552.954
4	0 1 3	2.01							430.117.400				725.000.000,00
4	0 1 3	2.01	01										
		Persentase Pengkoordinasian dalam Penyelenggaraan Perekonomian dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Lingkup Urusan Perekonomian	Kab.Banjar, Martapura, Keraton	100 Persen	20 Dokumen	100 Persen	384.170.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	20 Dokumen	500.000.000
4	0 1 3	2.01	02										
		Persentase Pengkoordinasian dalam Penyelenggaraan Perekonomian dan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Lingkup Urusan Perekonomian	Kab.Banjar, Martapura, Keraton	100 Persen	4 Laporan	100 Persen	45.946.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Laporan	225.000.000
4	0 1 3	2.02							95.549.600				745.552.954
4	0 1 3	2.02	01										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target		
		Persentase Pengkoordinasian dalam Penyelenggaraan Perekonomian dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Pembangunan	Kab.Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	4 Dokumen	100 Persen	43.649.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	4 Dokumen	396.832.954	
4	0 1 3	2.02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan										
		Persentase Pengkoordinasian dalam Penyelenggaraan Perekonomian dan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Pembangunan	Kab.Banjar, Martapura, Keraton	100 Persen	4 Laporan	100 Persen	36.459.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	4 Laporan	112.320.000	
4	0 1 3	2.02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan										
		Persentase Pengkoordinasian dalam Penyelenggaraan Perekonomian dan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Pembangunan	Kab.Banjar, Martapura, Keraton	100 Persen	2 Laporan	100 Persen	15.441.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan	236.400.000	
4	0 1 3	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa						568.488.400				1.900.000.000
4	0 1 3	2.03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa										
		Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pemenuhan Kriteria Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa yang baik	Kab.Banjar, Martapura, Keraton	60 Skor/Nilai	5 Dokumen	60 Persen	52.985.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	5 Dokumen	350.000.000	
4	0 1 3	2.03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
		Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase Pemenuhan Kriteria Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa yang baik	Kab.Banjar, Martapura, Keraton	60 Skor/Nilai	5 Dokumen	60 Persen	307.697.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	5 Dokumen	950.000.000
4	0 1 3	0 3	2.03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa								
		Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pemenuhan Kriteria Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa yang baik	Kab.Banjar, Martapura, Keraton	60 Skor/Nilai	83 Orang	60 Persen	207.805.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	83 Orang	600.000.000
4	0 1 3	0 3	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam				41.679.800				90.000.000
4	0 1 3	0 3	2.04	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan								
		Persentase Pengkoordinasian dalam Penyelenggaraan Perekonomian dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Persentase Fasilitasi Kebijakan SDA	Kab.Banjar, Martapura, Keraton	100 Persen	2 Dokumen	100 Persen	10.733.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	2 Dokumen	40.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target				
4	0 1	0 3	2.04	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air											
					Persentase Pengkoordinasian dalam Penyelenggaraan Perekonomian dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Persentase Fasilitasi Kebijakan SDA	Kab.Banjar, Martapura, Keraton	100 Persen	92 Dokumen	100 Persen	30.946.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	92 Dokumen	50.000.000
TOTAL											61.786.107.016		71.469.568.334			

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 yang disusun oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar merupakan rencana tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana kerja ini memberikan gambaran mengenai program, kegiatan, sasaran, Indikator-indikator kinerja dan target yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran dan pada akhir tahun anggaran pelaksanaannya dapat diukur.

Renja Sekretariat Daerah ini juga merupakan dasar acuan dalam mengevaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan. Harapan lainnya adalah agar semua unsur dalam Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar dapat menjadi tim kerja yang terintegrasi, bersinergi dan sistematis dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sehingga terjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan pembangunan namun lebih dari itu diharapkan dapat bergerak secara dinamis menyesuaikan dengan perubahan yang terus terjadi, maka perlu dirumuskan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

- 1) Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja, perlu dilaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Renja yang dijadikan bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya;
- 2) Dalam hal rencana kerja tahun 2024 tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan yang berpengaruh terhadap sasaran, kebutuhan keuangan daerah serta program dan kegiatan, maka dapat dilakukan penyesuaian Renja melalui penyusunan Perubahan Renja yang menjadi landasan penyusunan Perubahan RKA Tahun 2024.

Diharapkan Rencana Kerja ini dijadikan sebagai pedoman rencana operasional oleh bagian-bagian di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar dalam pelaksanaan tugas. Meskipun demikian, diharapkan pencapaian tujuan harus tetap memperhatikan integrasi, koordinasi dan sinkronisasi antara kemampuan sumber daya manusia dengan sumber daya

lainnya pada masing-masing bagian sehingga dapat melaksanakan semua kegiatan sesuai target waktu dan volume yang telah ditetapkan.

Dalam hal ketersediaan anggaran yang tidak mencukupi, maka diperlukan prioritas dan inovasi di tingkat pelaksanaan sehingga target kinerja Renstra Sekretariat Daerah dapat dicapai. Perencanaan tidak berhenti hanya pada penyusunan dan penetapan rencana, tetapi juga meliputi tahapan pengendalian pelaksanaan rencana dan tahapan evaluasi hasil pelaksanaan rencana. Karena itu, prosedur standar pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana harus diselenggarakan secara tepat.

Saat penjabaran Rencana Kerja ke dalam RKA, maka pada saat itu juga harus dilakukan perencanaan teknis pelaksanaan tiap kegiatan. Penjabaran RKA yang lebih detail pada perencanaan teknis pelaksanaan kegiatan itu sangat diperlukan untuk memperjelas tahapan pelaksanaan kegiatan untuk menjamin pencapaian target kinerja kegiatan dan capaian programnya. Selain itu, perencanaan teknis pelaksanaan tiap-tiap kegiatan juga akan dapat mengantisipasi semua permasalahan yang mungkin muncul dan lebih memudahkan upaya sinergi dengan para pihak yang terkait lainnya, baik di lingkungan pemerintahan maupun di luar pemerintahan.

Demikian Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar tahun 2024 ini disusun. Semoga Allah SWT selalu meridhai semua langkah kita menuju Kabupaten Banjar yang MANIS (*Maju, Mandiri dan Agamis*).

Martapura, 31 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH



Dr. Ir. H. Mokhammad Hilman, ST, MT
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19700328 199503 1 001